

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL (BANSOS) BAGI MASYARAKAT MISKIN
KELURAHAN TETEBATU KECAMATAN PALANGGA
KABUPATEN GOWA**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS) BAGI MASYARAKAT MISKIN KELURAHAN TETEBATU KECAMATAN PALANGGA KABUPATEN GOWA

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

MARINDAH LESTARI Nomor

Stambuk : 105611122918

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial
(Bansos) Bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Tetebatu
Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Marindah Lestari
Nomor Induk Mahasiwa : 105611122918
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si.


Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si.

NBM: 730 727

NBM: 991742

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Marindah Lestari

Nomor Induk Mahasiswa : 105611122918

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar hasil penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Januari 2025

Yang Menyatakan,

Marindah Lestari



ABSTRAK

Marindah Lestari, Andi Rosdianti Razak, Nurbiah Tahir. 2025. Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Tetebatu Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemberian Bansos sembako bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tetebatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. Informan penelitian terdiri atas Dinas Sosial (DINSOS) dan masyarakat Kelurahan Tetebatu Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bansos di Kelurahan Tetebatu masih menghadapi berbagai kendala dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi dalam implementasi bantuan sosial (Bansos) di Kelurahan Tetebatu masih belum optimal dan memerlukan perbaikan. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas komunikasi dengan memanfaatkan berbagai saluran yang lebih inklusif, seperti sosialisasi langsung, penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik, serta keterlibatan aktif dari tokoh masyarakat. Sumber daya dalam implementasi bantuan sosial (Bansos) di Kelurahan Tetebatu masih belum optimal. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap ketersediaan tenaga kerja, memperbaiki infrastruktur distribusi, serta meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran. Disposisi pelaksana dalam implementasi bantuan sosial (Bansos) di Kelurahan Tetebatu masih perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu melakukan pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam distribusi bantuan sosial (Bansos) serta menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua pelaksana bekerja dengan profesionalisme dan tanggung jawab. Struktur birokrasi dalam implementasi bantuan sosial (Bansos) di Kelurahan Tetebatu masih perlu diperbaiki. Penyederhanaan prosedur administrasi, pemanfaatan teknologi digital dalam pendataan, serta peningkatan transparansi dalam proses verifikasi data dapat menjadi langkah yang efektif untuk memperbaiki sistem birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Bansos dan Masyarakat.

ABSTRACT

Marindah Lestari, Andi Rosdianti Razak, Nurbiah Tahir. 2025. *Implementation of the Policy on Providing Social Assistance (Bansos) for the Poor in Tetebatu Village, Palangga District, Gowa Regency.*

This study aims to determine the implementation of the policy of providing basic food assistance for the poor in Tetebatu Village. This research uses a qualitative approach which is carried out in Tetebatu Village, Palangga District, Gowa Regency. The research informants consisted of the Social Service Office (DINSOS) and the community of Tetebatu Village, Palangga District, Gowa Regency. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validation was conducted using triangulation of sources, techniques, and time

The results showed that the implementation of social assistance in Tetebatu Village still faced various obstacles in the aspects of communication, resources, disposition of implementers, and bureaucratic structure. Communication in the implementation of social assistance (Bansos) in Tetebatu Village is still not optimal and requires improvement. The government needs to increase the effectiveness of communication by utilising various channels that are more inclusive, such as direct socialisation, dissemination of information through print and electronic media, and active involvement of community leaders. Resources in the implementation of social assistance (Bansos) in Tetebatu Village are still not optimal. The government needs to evaluate the availability of labour, improve distribution infrastructure, and increase efficiency in budget utilisation. The disposition of implementers in the implementation of social assistance (Bansos) in Tetebatu Village still needs to be improved. The government needs to conduct training for officers involved in the distribution of social assistance (Bansos) and implement a stricter supervision system to ensure that all implementers work with professionalism and responsibility. The bureaucratic structure in the implementation of social assistance (Bansos) in Tetebatu Village still needs to be improved. Simplifying administrative procedures, utilising digital technology in data collection, and increasing transparency in the data verification process can be effective steps to improve the bureaucratic system.

Keywords: Implementation; Policy; Social Assistance and Community.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Tetebatu Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa”**. Yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teruntuk kepada orang tua tercinta saya Ayahanda Bapak Humaedi, S.Pd., M.Pd. dan Ibunda Agustin, S.Pd., serta saudara saya Moh. Jumadil Khair, S.Pd, dan Moh Rehan Firaz yang tiada henti-hentinya memberikan doa, semangat dan segala bantuan baik berupa materi maupun waktu untuk peneliti dalam perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

1. Bapak Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Plt. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Ibu Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si. selaku Pembimbing I dan Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP., selaku pembimbing II, yang tak kenal lelah memberikan bimbingan, mengarahkan, mengoreksi serta selalu mendorong dan membantu memberikan semangat peneliti hingga penyelesaian skripsi.
5. Segenap keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HUMANIERA) telah menjadi rumah kedua dalam proses banyak hal yang ada di internal kampus.

6. Kepada seluruh masyarakat atau perangkat desa yang ada Di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa yang telah meluangkan waktunya dan memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Terima Kasih untuk senior saya yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi dalam suka maupun duka yaitu Kakanda Iwan, S.Sos., M.AP., Kakanda Andi Akbar, S.Sos., M.AP., Kakanda Subakti Asti, S.Sos., kakanda Riswanto, S.Sos., Kakanda Musmain, S.Sos., dan Kakanda di MAPPAMELLO Official atas arahannya selama ini.
8. Terima kasih untuk saudara/i seperjuangan baik suka maupun duka, Lailya Asfarin Inayati, Aswan Adi Putra, S.M, Reza Abdullah, S.Ap, Rismawati, S.Ap, Yusman, S.Ap, Hermianti, S.Ap, Eriks Febriansyah, S.Ap, Syahrul Ilhamsyah, Sultan Adam Fahmi Dgn Raja, S.Ap., Rizaldi, S.Ap, Muh Arfah, Yaqub Nur Afriansyah, Nur Elisa, S.Ap, dan seluruh seluruh saudara/i seangkatan Ilmu Administrasi Negara.
9. Marindah Lestari, ya! Itu diri saya sendiri. Saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri karena telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah saya mulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *God thank you for being me independent women, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement.*
10. Serta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan.

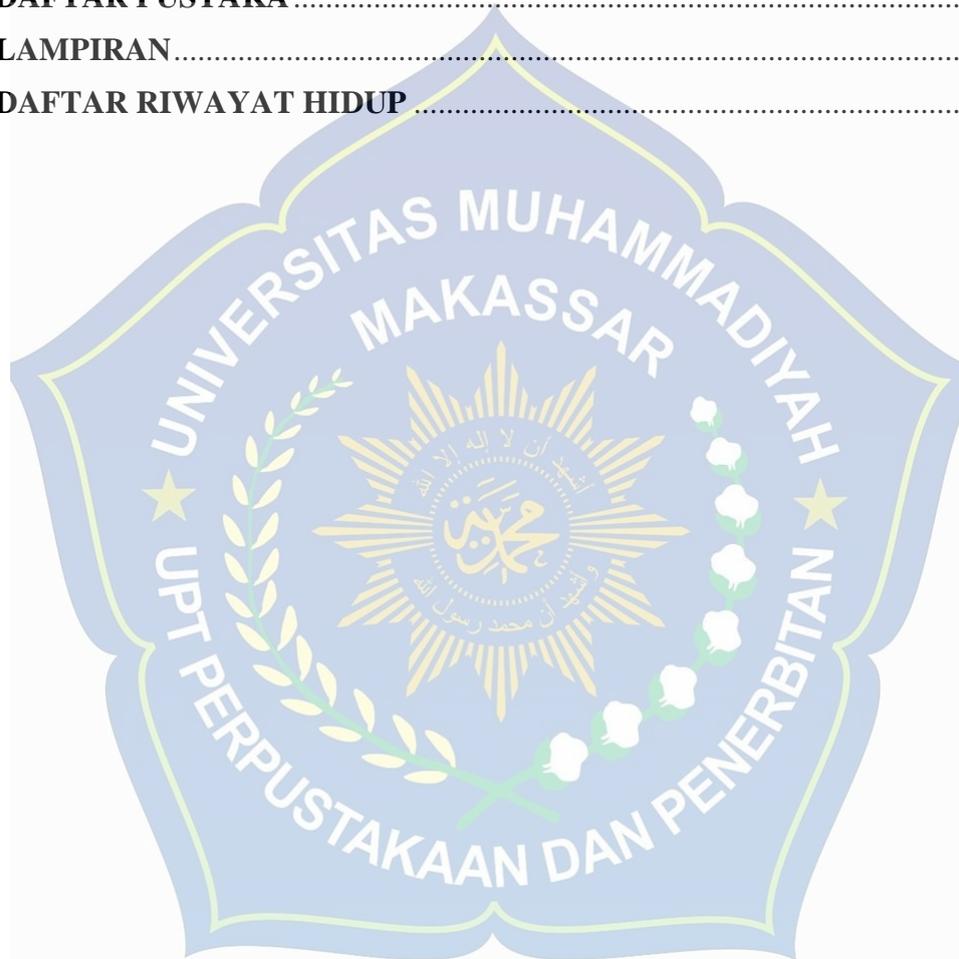
Akhirnya skripsi ini telah selesai, semoga dan bermanfaat kepada semua pihak baik penulis maupun orang lain, Insya Allah. Semoga mendapat lindungan, berkah, dan karunia dari Allah Swt kepada bapak, ibu serta Saudara (i) atas segala bantuannya. *Aamiin Ya Rabbal Aamiin.*

*Jazakumullahu Khairan Katsiran
Billahi Fii Sabilil Haq. Fastabiqul Khairat
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Teori dan Konsep Kebijakan Publik.....	11
C. Konsep Bantuan Sosial (Bansos).....	21
D. Belanja Bantuan Sosial.....	24
E. Teori kesejahteraan sosial.....	26
F. Kerangka Pikir.....	30
G. Fokus Penelitian	30
H. Deskripsi Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian	33
C. Informan	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Pengabsahan Data	35
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	39
B. Hasil Penelitian.....	44
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	63
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan Tiga Elemen Kebijakan Publik	12
Gambar 2.2 Kerangka Pikir	30
Gambar 4.1 Koordinasi dengan perangkat desa dan pendamping sosial melalui penyuluhan.....	50
Gambar 4.2 Sembako yang siap dibagikan ke masyarakat miskin kelurahan tetebatu.....	55
Gambar 4.3 Tahap Penyaluran Bansos ke masyarakat miskin di salah satu Kelurahan Tetebatu.....	59
Gambar 4.4 Pendistribusian sembako masyarakat kelurahan Tetebatu kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	34
Tabel 4.1 Penerima Bantuan Sosial Tiga Tahun Terakhir	40
Tabel 4.2 Penerima Bantuan Sosial Berupa Sembako Kelurahan Tetebaru Tahun 2025	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang menjadi perhatian utama pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan, salah satunya adalah program pemberian bantuan sosial (Bansos) (Sopah et al., 2020). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Bantuan Sosial tidak hanya berupa bantuan tunai, tetapi juga bantuan non-tunai seperti sembako, pendidikan, dan kesehatan.

Penyaluran Bansos merupakan otoritas administratif masing-masing Pemda (Kusnasari, Sri et al., 2021). Namun akibat dari ketidak seragaman pedoman yang berkaitan dengan belanja bantuan sosial (Bansos) di setiap daerah yang diperlihatkan Pemda (Pemerintah Daerah), diduga ini dipengaruhi oleh masing-masing Pemda (Pemerintah Daerah). Meskipun belum ada penelitian yang secara spesifik membuktikan pengaruh karakteristik organisasi terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial (Bansos), tetapi ada beberapa penelitian yang menghubungkan karakteristik dari suatu organisasi dengan penerapan kebijakan, kinerja ataupun Tingkat pengungkapan secara umum.

Daerah diperbolehkan memberikan bantuan sosial (Bansos) sesuai kemampuan daerah setelah menyelesaikan pembiayaan belanja wajib. Yang berhak menerima bantuan sosial (Bansos) adalah masyarakat yang mengalami

keadaan tidak stabil dari krisis ekonomi, sosial, politik dan bencana alam, supaya yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan hidup minimum (Laloan et al., 2021). Bansos dapat juga diberikan kepada Lembaga Non Pemerintahan (*Non Government Organisation*) yang bergerak dibidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Berdasarkan Perda Gowa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pasal 8 ayat (6) dijelaskan “Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp16.368.060.820,00 (Enam belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta enam puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah)” (PERDA, 2022).

Pemerintah Kabupaten Gowa telah menerapkan berbagai kebijakan bantuan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang bertugas merumuskan kebijakan berbasis pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan, serta sinergitas program penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif. Salah satu program yang telah berjalan adalah penyaluran bantuan cadangan pangan berupa beras kepada 61.145 penerima manfaat bekerja sama dengan Perum Bulog. Setiap keluarga menerima 10 kg beras per bulan selama enam bulan guna menjaga ketahanan pangan di tengah dampak perubahan iklim. Selain itu, Pemkab Gowa juga membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di tingkat desa/kelurahan

melalui Peraturan Bupati Gowa Nomor 40 Tahun 2018, yang berfungsi sebagai pusat layanan terpadu untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan sosial.

Di sisi lain, pemerintah juga mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program bantuan tunai bersyarat guna meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Program ini telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka kemiskinan di berbagai kecamatan, seperti di Pallangga. Seluruh kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Pada Januari 2024, Pemkab Gowa bekerja sama dengan Polda Sulsel menyalurkan 4.000 paket sembako kepada masyarakat di 18 kecamatan. Setiap pihak menyumbangkan 2.000 paket, yang disalurkan langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan bantuan tepat sasaran (Gowa, 2024).

Kebijakan pemberian bantuan sosial (Bansos) yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Program bantuan sosial (Bansos) ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sembako. Implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan regulasi nasional seperti Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Kebijakan Bansos (bantuan sosial) di Gowa mendapat dukungan konkret, seperti pada Januari 2024, ketika Pemerintah Kabupaten Gowa bersama Polda Sulsel menyalurkan 4.000 paket sembako kepada masyarakat di 18 kecamatan, termasuk Kelurahan Tetebatu. Program ini menekankan distribusi langsung ke rumah warga untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk sosialisasi yang kurang efektif membuat sebagian masyarakat tidak mengetahui jadwal atau mekanisme pembagian bansos. Terbatasnya tenaga pelaksana dan kurangnya infrastruktur pendukung menjadi hambatan dalam distribusi. Beberapa pelaksana kebijakan tidak responsif terhadap keluhan masyarakat. Proses administrasi yang berbelit-belit menghambat efektivitas program.

Dengan demikian, meskipun kebijakan bantuan sosial (Bansos) di Gowa dirancang sesuai aturan nasional, efektivitasnya masih terhambat oleh permasalahan dalam implementasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan agar program bansos benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Gowa.

Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran program Bantuan Sosial. Wilayah ini memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Sebagai salah satu bentuk intervensi, program Bansos diharapkan mampu memberikan implemtasi positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di wilayah ini..

Namun, efektivitas program bantuan sosial (Bansos) masih menjadi perdebatan. Banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan program ini, seperti akurasi data penerima, mekanisme distribusi bantuan, serta partisipasi masyarakat. Dalam beberapa kasus, terdapat laporan mengenai tidak meratanya distribusi bantuan, ketidaktepatan sasaran, dan potensi penyalahgunaan dana. Kondisi ini dapat mengurangi dampak positif yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

Selain itu, penerimaan Bansos juga memengaruhi pola perilaku masyarakat. Sebagian masyarakat mengandalkan bantuan ini sebagai sumber utama pendapatan, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai dorongan untuk meningkatkan usaha dan produktivitas. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian Bantuan Sosial berupa pembagian sembako terhadap masyarakat miskin di Kelurahan Tetebatu. Fokus kajian meliputi perubahan ekonomi, sosial, dan pola perilaku masyarakat penerima bantuan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas program bantuan sosial (Bansos), sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Untuk itu saya selaku peneliti melakukan penelitian tentang **Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Tetebatu Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial (Bansos) sembako bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial (Bansos) sembako bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tetebatu.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian pada Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Tetebatu Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. yaitu:

1. Manfaat Analisis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian kebijakan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung dalam hal penelitian tentang implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) pembagian sembako terhadap masyarakat miskin Kelurahan Tetebaru Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.

3. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial (Bansos) pembagian sembako terhadap masyarakat miskin Kelurahan Tetebaru Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.
4. Bagi Instansi dalam hal ini pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan program Bantuan Sosial agar lebih efektif dan tepat sasaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian sebelumnya menemukan hal-hal berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Laloan/2021	Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa	Desain penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin yang terdampak covid-19 di kecamatan kawangkoan.	Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa dalam proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 belumlah berjalan dengan semestinya yang diharapkan oleh banyak masyarakat. Sebab masih ada penyelewengan yang terjadi pada saat pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang terdampak covid di kecamatan kawangkoan. Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan populasi di Kecamatan Kawangkoan sebesar 10.226 dengan mengambil

				sampel sebanyak 30 orang di dalam populasi.
2.	Novilia /2022	Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.	Implementasi kebijakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Sako sudah baik. Sumber daya yang ada pada Dinas Sosial menjadi penentu keberhasilan program bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Palembang.
3.	Tri Wulandari/ 2023	Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)	pendekatan deskriptif dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, kepala bidang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kota Parepare termasuk efektif dalam menyalurkan dana bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, karena dalam melakukan penyaluran dana bantuan sosial

			<p>rehabilitasi sosial, dan kepala bidang korban bencana. Data sekunder dari penelitian sebelumnya yaitu buku, skripsi, dan jurnal.</p>	<p>dilakukan secara efektif dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi, pemberian bantuan sosial yang diserahkan oleh pihak kantor kelurahan belum dilakukan secara efektif karena bantuan sosial yang diberikan tidak sepenuhnya diterima oleh penerima bantuan sosial. Maka pihak Dinas Sosial Kota Parepare selalu melakukan perbaikan setiap tahunnya. 2) Mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial Dinas Sosial Kota Parepare yang dilaksanakan pada setiap Kelurahan dimulai dengan pendataan penerima bantuan yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan kemudian dikoordinasikan kepada Kantor Kelurahan dan pimpinan di atasnya serta penyaluran bantuan dari Kelurahan melalui Kepala Lingkungan sampai kepada</p>
--	--	--	---	---

				masyarakat yang sudah terdata sebelumnya.
--	--	--	--	---

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian yang akan diteliti yaitu :

1. Dari penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti terdapat pada perbedaan narasumber dan tahun penelitian.
2. Lokasi penelitian yang akan diteliti berbeda dengan penelitian terdahulu.
3. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

B. Teori dan Konsep Kebijakan Publik

1. Teori Kebijakan Publik

Definisi kebijakan menurut Dunn (1999) adalah aturan tertulis sebagai keputusan yang bersifat formal pada suatu organisasi yang mengikat dan mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan nilai baru dalam kehidupan masyarakat (Rozak & Az-Ziyadah, 2021). Di sisi lain, Anderson (1979) menyatakan bahwa kebijakan ialah arah suatu tindakan dengan tujuan yang ditetapkan oleh seseorang atau sekelompok pelaku dalam menghadapi persoalan (Choiriyah, 2018).

Dengan demikian, secara umum kebijakan dapat dipahami sebagai suatu keputusan formal yang dirancang untuk mengatur perilaku serta menciptakan nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan juga berfungsi sebagai arah tindakan yang ditetapkan oleh individu atau kelompok dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya bersifat normatif dan mengikat, tetapi juga memiliki tujuan strategis

dalam mencapai kesejahteraan sosial. Implementasi kebijakan yang efektif sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, serta evaluasi yang berkelanjutan guna memastikan implementasi positif bagi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Adapun kebijakan publik atau public policy didefinisikan oleh Charles O. Jones (1978) sebagai penghubung di antara unit dalam suatu pemerintahan dengan lingkungan sekitarnya (Ardhana Januar Mahardhani, 2018). Selaras dengan hal tersebut, Dunn (1999) menjelaskan bahwa dalam pembuatan kebijakan publik atau pemerintah melibatkan tiga elemen utama, yakni pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik itu sendiri. Hubungan ketiga elemen tersebut diilustrasikan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Hubungan Tiga Elemen Kebijakan Publik

Berdasarkan konsep kebijakan ini, terdapat beberapa implikasi menurut Anderson (1979), di antaranya sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik selalu memiliki tujuan tertentu atau perilaku yang berorientasi pada tujuan;
- b. Kebijakan publik adalah sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sesuatu yang diinginkan pemerintah;

- c. Kebijakan publik yang diambil dapat bersifat positif (tindakan pemerintah terhadap isu tertentu) atau dapat pula bersifat negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan apa-apa);
- d. Kebijakan pemerintah didasarkan pada hukum sehingga dapat ditegakkan dan memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi; dan
- e. Suatu kebijakan publik saling berkaitan dengan kebijakan yang lain, dan terdiri atas tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (choiriyah, 2018).

2. Konsep Pendekatan Kebijakan Publik

Menurut Nurdin dan Usman menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemosstrasikan metode pengajaran yang digunakan (Taufiqurokhman, 2017).

Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi atau materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru

terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap (Gunarta, 2017).

Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi) (Girsang & Situmeang, 2016).

Menurut Patton menyatakan bahwa Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi (Aprilia, 2024).

Menurut Mazmannia menjelaskan implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang nyata terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau di rumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman kebijakan (Yuliah, 2020).

Berdasarkan berbagai perspektif mengenai implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi bukan sekadar pelaksanaan teknis dari suatu kebijakan, tetapi juga melibatkan berbagai

tahapan penting, seperti perencanaan, pengorganisasian, interaksi dengan pemangku kepentingan, hingga evaluasi dan penyempurnaan. Pendekatan yang dikemukakan oleh Nurdin dan Usman menunjukkan bahwa implementasi dapat berlangsung sebelum, selama, atau setelah suatu kebijakan diterapkan, bergantung pada kebutuhan dan karakteristik program yang dirancang. Sementara itu, Patton dan Mazmannia menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya mencakup eksekusi formal, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diinterpretasikan, dan disesuaikan dalam praktiknya. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada koordinasi antara pengambil kebijakan, pelaksana, serta penerima manfaat, sehingga kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan Implementasi yang diharapkan.

3. **Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan dalam proses kebijakan yang berfokus pada pelaksanaan keputusan pemerintah setelah kebijakan ditetapkan. Implementasi ini melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan mekanisme untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah dirancang sebelumnya (Mansur, 2021).

Menurut Edward III, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa kebijakan dipahami dengan baik oleh para pelaksana.

Sumber daya yang mencakup tenaga kerja, dana, dan infrastruktur sangat menentukan efektivitas pelaksanaan. Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan turut berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi, terutama dalam hal kesediaan mereka untuk menjalankan kebijakan dengan baik. Terakhir, struktur birokrasi yang jelas dan tidak berbelit-belit akan mempermudah koordinasi dalam implementasi kebijakan (Edward III, 1980).

Kebijakan yang diimplementasikan yang mengandung resiko gagal Menurut Hogwood dan Gunn, untuk itu kegagalan kebijakan dapat dibagi kedalam pengertian yaitu: (*Policy Failure*) dalam dua katagori, yaitu tidak terimplementasikan (*nonimplementation*) dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implemation*) (Umi et al., 2023). Kegagalan implementasi kebijakan, kebanyakan disebabkan oleh:

- a. Pelaksanaan yang kurang baik (*bad execution*)
- b. Kebijakannya sendiri yang memang jelek (*bad policy*)
- c. Kebijakan yang bernasib (*bad luck*) (Umi et al., 2023).

Dalam perspektif Mazmanian dan Sabatier, keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik bukan hanya sekadar menjalankan aturan, tetapi juga memerlukan strategi yang tepat agar kebijakan dapat mencapai hasil yang optimal di Masyarakat (Mazmanian & Paul, 1983).

4. Indikator Implementasi

Menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat indikator ini menentukan sejauh mana sebuah kebijakan dapat dijalankan dengan baik serta memberikan dampak yang optimal bagi sasaran kebijakan.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan merujuk pada bagaimana kebijakan disampaikan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Komunikasi yang baik memastikan bahwa kebijakan dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat, sehingga dapat diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas komunikasi dapat dilihat dari:

- 1) Kejelasan Informasi adalah tingkat keterpahaman suatu pesan atau kebijakan yang disampaikan kepada pihak terkait, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas atau kesalahpahaman dalam implementasinya.
- 2) Saluran Komunikasi adalah media atau metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi, seperti pertemuan langsung, media sosial, surat edaran, atau siaran resmi, guna memastikan pesan diterima oleh sasaran yang tepat.
- 3) Pemahaman dan Respon Masyarakat adalah sejauh mana masyarakat mengerti informasi yang diberikan serta bagaimana

mereka menanggapi atau berpartisipasi dalam implementasi suatu kebijakan atau program.

- 4) Koordinasi Antar-Pelaksana adalah proses kerjasama dan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan yang mencakup tenaga kerja, anggaran, sarana dan prasarana, serta informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan dengan efektif. Sumber daya dalam implementasi kebijakan mencakup tenaga kerja, anggaran, sarana dan prasarana, serta informasi yang diperlukan agar program bansos dapat berjalan dengan optimal.

- 1) Tenaga Kerja adalah individu atau kelompok yang bertugas menjalankan suatu kebijakan atau program, termasuk aparatur pemerintah, petugas lapangan, dan pihak terkait lainnya.
- 2) Anggaran adalah alokasi dana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan suatu kebijakan atau program agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ditetapkan.
- 3) Sarana dan Prasarana adalah fasilitas fisik dan non-fisik yang mendukung kelancaran implementasi suatu kebijakan, seperti gedung, kendaraan, teknologi, serta sistem administrasi.

- 4) Informasi adalah data atau pesan yang dibutuhkan untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan secara efektif, termasuk pedoman, regulasi, serta komunikasi antara pelaksana dan masyarakat.

c. Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi mengacu pada sikap, niat, dan komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Jika pelaksana memiliki sikap positif terhadap kebijakan, maka implementasi cenderung lebih efektif. Sebaliknya, jika ada ketidakpedulian atau bahkan perlawanan terhadap kebijakan, maka implementasi dapat terhambat. Beberapa aspek disposisi meliputi:

- 1) Sikap Pelaksana Kebijakan adalah cara pandang, perilaku, dan respons individu atau kelompok yang bertanggung jawab dalam menjalankan suatu kebijakan, baik dalam hal profesionalisme, transparansi, maupun keadilan.
- 2) Niat dan Komitmen dalam Pelaksanaan adalah kesungguhan dan dedikasi pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Respon terhadap Keluhan Masyarakat adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam menanggapi, menyelesaikan, atau memberikan solusi terhadap permasalahan

yang disampaikan oleh masyarakat terkait implementasi suatu kebijakan atau program.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mengacu pada sistem administrasi, regulasi, dan mekanisme organisasi yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Struktur yang baik memungkinkan kebijakan berjalan dengan efisien, sementara struktur yang kaku dan berbelit-belit bisa menjadi hambatan utama. Berikut adalah beberapa aspek struktur birokrasi:

- 1) Sistem Administrasi adalah prosedur dan tata kelola yang digunakan dalam pengelolaan suatu kebijakan atau program, termasuk pencatatan, pendataan, serta pelaporan untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif dan terstruktur.
- 2) Regulasi dan Pedoman Teknis adalah aturan, kebijakan, serta prosedur yang ditetapkan sebagai acuan dalam implementasi suatu program atau kebijakan agar berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 3) Mekanisme Organisasi dan Koordinasi Antar-Instansi adalah sistem kerja sama dan komunikasi antara berbagai lembaga atau unit yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, guna memastikan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak berjalan secara sinergis dan efisien.

C. Konsep Bantuan Sosial (Bansos)

1. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Latif & Pangestu, 2022).

Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dinas bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

Pemanfaatan Bantuan Sosial (bansos) Berdasarkan dana APBN dikelompokkan menjadi empat bidang yaitu (Sri Lestari Rahayu, 2012):

- a. Bidang pendidikan meliputi Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Bea Siswa Pendidikan Siswa/Mahasiswa Miskin.
- b. Bidang kesehatan meliputi Program Jaskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit kelas III.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Perdesaan mencakup Kecamatan PPK, P2KP, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur

- Perdesaan/PPIP, PNPM Daerah Tertinggal/PDT, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).
- d. Bidang Perlindungan Sosial, meliputi Program Keluarga Harapan/PKH, dan Bantuan Langsung Tunai/BLT.

2. Dasar Hukum Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Saat ini regulasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat dikatakan “kompli”, walaupun sesungguhnya masih diperlukan berbagai ketentuan yang butuh penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri.

Regulasi atau ketentuan peranturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah dan Bansos (bantuan sosial) oleh pemerintah daerah adalah Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011 dan di undangkan pada tanggal 28 Juli 2012. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula sejak tanggal 3 Januari 2012 telah ditetapkan dan pada tanggal 4 Januari telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Sebelumnya regulasi pemberian hibah dan bantuan sosial hanya diatur dalam beberapa pasal dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Pemberian hibah hanya diatur dalam pasal 42, pasal 43, dan pasal 44, itupun sudah berulang kali diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011. Demikian pula untuk pemberian bantuan sosial hanya diatur dalam satu pasal, yakni pasal 45 dan terdiri atas 4 ayat dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Itupun sudah mengalami perubahan sampai dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011.

Untuk pemberian hibah, selain berpedoman pada Permendagri Nomor 32 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 tahun 2012, maka pemberian hibah yang bersumber pada APBD, juga diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah. Demikian pula untuk pemberian hibah dan bantuan sosial dalam penganggarannya juga diatur setiap tahunnya dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Misalnya untuk tahun anggaran 2013. Berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2013 pada lampiran V. Hal-hal khusus lainnya angka 26, maka untuk kebutuhan pendanaan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah daerah menganggarkan program dan kegiatan SKPD yang secara

fungsional terkait dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Ketentuan ini memberikan arti bahwa kegiatan TP-PKK harus dianggarkan melalui program dan kegiatan pada SKPD, dan tidak dibolehkan lagi dianggarkan lagi melalui hibah maupun bantuan sosial.

Kesimpulannya adalah Pemerintah daerah dalam memberikan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sejak tahun anggaran 2012 sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 32 tahun 2011. Sedangkan untuk tahun anggaran 2013 selain berpedoman Permendagri Nomor 32 tahun 2011 juga berpedoman pada Permendagri Nomor 39 tahun 2012 dan untuk hibah juga berpedoman pada PP Nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah (Yusran Lapananda, 2013).

D. Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Permensos Nomor 5 Tahun 2021, belanja bantuan sosial adalah upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat tidak mampu atau miskin dari kemungkinan terjadinya risiko sosial melalui pengeluaran negara yang ditujukan kepada masyarakat kategori miskin, tidak mampu, atau rentan dan tidak untuk dikembalikan kepada negara atau diambil hasilnya berupa transfer uang, barang, atau jasa dari Pemerintah Pusat/ Daerah dengan tujuan meningkatkan kemampuan ekonomi dan mencapai kesejahteraan masyarakat agar dapat hidup secara wajar.

Dari segi durasi penyaluran, bantuan sosial dapat bersifat berkelanjutan yang diberikan secara terus-menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan dan kemandirian atau dapat juga bersifat sementara yang tidak

diberikan setiap tahun anggaran dengan skema penyaluran diberhentikan jika penerima dapat dikategorikan telah lepas dari risiko sosial. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang dengan penyaluran nontunai, barang, dan jasa. Masalah sosial yang menjadi kriteria penerima bantuan sosial antara lain: kemiskinan, terlantar, disabilitas, penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana, dan korban tindak diskriminasi, eksploitasi, korban penyalahgunaan zat adiktif, psikotropika, dan narkoba.

Bansos yang bersumber dari alokasi APBN dikelompokkan dalam empat bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial (Muhassin & Yasin, 2024). Dalam mekanisme penyalurannya, bantuan sosial dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga yang telah diatur dalam PMK Nomor 228/PMK.05/2016. Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial berasal dari APBN berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/ Lembaga yang mempunyai tugas melakukan program rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, penanggulangan bencana dan pelayanan dasar, pemberdayaan sosial, serta penanggulangan kemiskinan.

Kementerian/ Lembaga tersebut adalah salah satunya Kementerian Sosial dalam tupoksinya berupa penyaluran bantuan sosial melalui berbagai jenis program bantuan sesuai tupoksi yang telah disebutkan di atas. Melalui program perlindungan dan jaminan sosial atau disebut Jaring Pengaman Sosial (JPS) disalurkan dalam jenis program seperti Program Keluarga Harapan dan korban bencana alam maupun sosial. Jenis Bantuan Sosial pada penanganan

fakir miskin terdiri atas rehabilitasi rumah tidak layak huni, Bantuan Pangan BPNT, bantuan sosial dalam rangka menciptakan ekonomi produktif melalui usaha bersama. Jenis bantuan berupa rehabilitasi sosial dapat berupa lanjut usia, rehabilitasi sosial anak, tuna sosial, penyandang disabilitas, dan korban penyalahgunaan obat terlarang.

E. Teori kesejahteraan sosial

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, baik kita suka atau tidak, hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berkaitan dengan orang lain (Jones, 2009). Kondisi sejahtera (well-being) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Menurut Midgley (Midgley, 2000) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “..a condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Agar dapat memahami lebih dalam apa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial berikut definisi kesejahteraan sosial menurut para ahli.

Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu (Suud, 2006). Menurut Suharto (Suharto, 2006) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan,

lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan adalah sebagai berikut di bawah ini.

Menurut Suparlan (dalam Suud, 2006), kesejahteraan sosial, menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja, jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan.

Kesejahteraan sosial menurut Friedlander (dalam Suud, 2006):

Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Kesejahteraan sosial menurut Segal dan Brzuzy yang dikutip (dalam Suud, 2006)

Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.

Sedangkan kesejahteraan sosial menurut Midgley (dalam Suud, 2006)

menjelaskan bahwa:

Suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut. Itu adalah, pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan, kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan terakhir, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas dan bahkan seluruh masyarakat.

Definisi-definisi di atas menekankan pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan. Setiap kelompok mempunyai definisi yang berbeda dari berbagai ahli. Berikut definisi-definisi kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan menurut beberapa ahli:

Menurut Durham (Suud, 2006) kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan-pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan, dan pencegahan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling membantu, agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera.

Selanjutnya Wilensky dan Lebeaux (Suud, 2006) merumuskan kesejahteraan sosial sebagai:

Sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Menurut Wickedan dalam Suud (2006:8) mengemukakan bahwa:

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem peraturan, program-program, kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memenuhi kebutuhankebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keteraturan sosial.

Arti kesejahteraan yang terakhir adalah kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu, orang-orang yang mempunyai berbagai macam kebutuhan akan pelayanan-pelayanan tersebut di atas, khususnya yang tidak dapat memenuhinya berdasarkan kriteria pasar, maka mereka menjadi sasaran atau perhatian kesejahteraan sosial (Husna, 2014). Aksi sosial sebagai metode bantu dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dapat melalui jalan perundang-undangan. Menurut Segal dan Brzuzy (Suud, 2006), Kebijakan sosial juga merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial terdiri dari usaha-usaha dan struktur-struktur yang terorganisasi untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk sederhana, sistem kesejahteraan sosial dapat dikonseptualisasikan sebagai empat bagian yang saling berhubungan sebagai berikut:

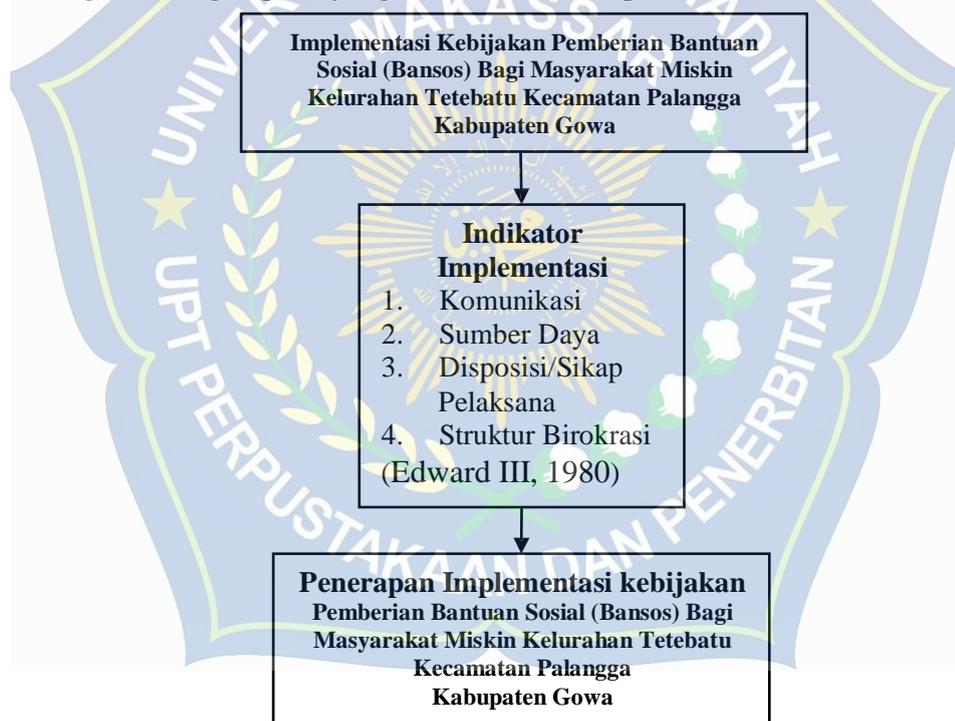
1. Isu-isu sosial;
2. Tujuan-tujuan kebijakan;
3. Perundangan/peraturan;
4. Program-program kesejahteraan sosial

Sistem kesejahteraan sosial dimulai dengan mengenali isu sosial. Sekali isu tersebut diakui sebagai perhatian sosial, langkah selanjutnya adalah mengartikulasikan tujuan-tujuan kebijakan. Tujuan-tujuan ini dapat menghasilkan suatu posisi publik yang diciptakan melalui perundangan atau

peraturan. Akhirnya, perundangan diterjemahkan ke dalam tindakan melalui penerapan suatu program kesejahteraan sosial.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan Uraian di atas), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat indikator ini menentukan sejauh mana sebuah kebijakan dapat dijalankan dengan baik serta memberikan dampak yang optimal bagi sasaran kebijakan. Berikut gambar bagan kerangka pikir yang telah dibuat oleh peneliti:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

G. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) terhadap masyarakat miskin Kelurahan Tetebatu Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa Yang akan dikaji menggunakan

indikator implementasi antara lain Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi (Edward III, 1980).

H. Deskripsi Penelitian

Deskripsi penelitian merupakan uraian dari masing-masing fokus yang akan diamati untuk memberikan kejelasan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Dalam konteks implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial (Bansos), komunikasi berperan penting dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan, mekanisme penyaluran, serta hak dan kewajiban penerima manfaat.
2. Sumber daya adalah segala bentuk aset, baik berupa manusia, material, finansial, maupun teknologi, yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial (Bansos), sumber daya memiliki peran krusial dalam memastikan kebijakan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
3. Disposisi dalam konteks kebijakan publik merujuk pada sikap, komitmen, dan respons dari para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Disposisi yang baik mencerminkan keseriusan dan konsistensi aparat pemerintah dalam menerapkan kebijakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
4. Struktur birokrasi adalah sistem tata kelola dalam organisasi pemerintahan yang mencakup pembagian tugas, kewenangan, serta mekanisme kerja

untuk menjalankan kebijakan secara efektif. Struktur birokrasi yang baik ditandai dengan adanya koordinasi yang jelas, prosedur yang sistematis, serta tanggung jawab yang terdistribusi dengan baik di antara berbagai tingkat pemerintahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhitung setelah kurang lebih 2 bulan. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Tetebaru Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu serta perilaku yang diamati. Data ini diperkuat oleh hasil wawancara yang berisi pernyataan atau ungkapan langsung dari informan, memberikan gambaran mendalam yang autentik dan terstruktur.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang berupaya menggambarkan fakta-fakta yang ada secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan suatu fenomena yang kemudian diklasifikasikan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan. Dengan pendekatan ini, proses penelitian dan pengamatan menjadi lebih terarah dan sistematis.

C. Informan

Informan dalam penelitian ini di gunakan untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang terjadi yang melatar belakangi penelitian ini. Informan dipilih menggunakan teknik random, yang memberikan peluang yang sama bagi setiap individu untuk terlibat dalam

penelitian ini (Asrulla et al., 2023). Pendekatan ini memastikan pengumpulan data yang objektif dan mewakili populasi secara adil. Informan yang yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan
1	Andi Baso Gazali, S.Sos., M.Si.	BG	Dinas Sosial
2	Andi Darwis, S.Sos.	AD	Perangkat Desa
3	Ahmad Muslihin	AM	pendamping bansos
4	Akbar Baso	AB	Pendamping bansos
5	Zainal Abidin	ZA	Masyarakat
6	Hanifah	H	Penerima

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono (Sugiyono, 2018), Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. prosedur pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan data. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (pengamatan)

Teknik ini dilakukan dengan mengamati langsung kondisi lapangan, perilaku masyarakat, serta situasi yang berkaitan dengan

pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sosial di Kelurahan Tetebatu. Observasi memungkinkan peneliti mendapatkan data visual dan kontekstual secara objektif, seperti cara masyarakat menerima dan memanfaatkan bantuan sosial.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan yang telah ditentukan, seperti masyarakat penerima bantuan sosial, perangkat kelurahan, atau pendamping Bansos (Wahidah et al., 2022). Teknik ini bertujuan menggali informasi mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan Implementasi bantuan sosial terhadap kehidupan mereka. Wawancara dapat berupa pertanyaan terbuka untuk memberikan ruang bagi informan menjelaskan secara detail.

3. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen, seperti laporan resmi pemberian bantuan sosial, data jumlah penerima manfaat, dan foto kegiatan terkait. Teknik ini digunakan untuk melengkapi dan mendukung data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, sehingga menghasilkan informasi yang lebih valid dan komprehensif.

E. Teknik Pengabsahan Data

Semua data yang diperoleh dan yang ditemukan dalam penelitian ini akan di uji kredibilitasnya dengan cara triangulasi. Menurut sugiyono (Sugiyono, 2016), triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjutnya sugiyono membagi triangulasi kedalam tiga macam yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk memastikan validitas informasi. Dalam konteks penelitian ini, data dapat diperoleh dari berbagai pihak yang terkait, seperti penerima bantuan sosial, perangkat kelurahan, dan pendamping Bansos. Dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda, peneliti dapat memastikan data yang lebih akurat dan tepercaya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memverifikasi kesesuaian informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini, kombinasi antara observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif. Dengan demikian, data yang diperoleh dari berbagai teknik ini akan saling melengkapi dan memperkuat hasil penelitian.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu mengacu pada pengumpulan data pada berbagai waktu atau periode untuk melihat konsistensi informasi. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan pada waktu yang berbeda, baik sebelum, selama, maupun setelah penerimaan bantuan sosial. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana Implementasi bantuan sosial berkembang seiring waktu, serta apakah ada perubahan atau

ketidakkonsistenan dalam respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data menurut Sugiono (Sugiyono, 2018) merupakan proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyaringan dan pemilahan informasi yang relevan untuk fokus penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan disaring agar hanya informasi yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan Bansos terhadap masyarakat miskin yang disimpan. Proses ini bertujuan untuk mempermudah analisis dan menghindari data yang tidak relevan atau berlebihan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah langkah untuk mengorganisasi dan memvisualisasikan data yang telah direduksi agar dapat lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian ini, penyajian data dapat dilakukan melalui tabel, grafik, atau narasi yang menggambarkan pola-

pola dan temuan utama dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian yang jelas membantu peneliti untuk melihat hubungan antara variabel yang diteliti dan menggambarkan temuan penelitian secara sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam analisis data, di mana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini dapat berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau penemuan baru terkait implementasi kebijakan Bansos. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan verifikasi atau pemeriksaan kembali terhadap data untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik valid dan dapat dipertanggungjawabkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Tetebatu merupakan salah satu wilayah administratif yang menjadi fokus program pemberian bantuan sosial (Bansos) oleh pemerintah daerah. Wilayah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga menjadi sasaran utama program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin.

Sebagai bagian dari Kabupaten Gowa, Kelurahan Tetebatu memiliki kondisi sosial-ekonomi yang beragam, dengan mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor informal, pertanian, dan usaha kecil. Beberapa faktor yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah tingkat keterjangkauan bantuan sosial, mekanisme distribusi bansos, serta efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemerintah Kabupaten Gowa telah menjalankan berbagai program bantuan sosial untuk masyarakat miskin, termasuk bantuan sembako yang didistribusikan langsung kepada penerima manfaat. Pada tahun 2024, Pemkab Gowa bekerja sama dengan Polda Sulsel menyalurkan 4.000 paket sembako kepada masyarakat di 18 kecamatan, termasuk Kelurahan Tetebatu. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit.

Meskipun bantuan sosial telah diberikan secara rutin, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan akses bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, akurasi data penerima, serta transparansi dalam pendistribusian. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis lebih dalam bagaimana kebijakan pemberian bansos di Kelurahan Tetebaru diimplementasikan, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang tersedia, berikut adalah jumlah Penerima Manfaat (KPM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tetebaru dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 4.1 Penerima Bantuan Sosial Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Keluarga Penerima Manfaat (PKH)	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
2022	500	1.500
2023	480	1.450
2024	460	1.400

Fokus dari penelitian ini adalah penerima Bansos Sembako Kelurahan Tetebaru Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penerima Bantuan Sosial Berupa Sembako Kelurahan Tetebatu Tahun 2025

No	Nama Penerima	Inisial	Alamat	Jumlah Keluarga	Jenis Bantuan	Keterangan
1	Abdul Rahman	AR	Bontoala	4	Sembako	Aktif
2	Sitti Aisyah	SA	Bontoramba	3	Sembako	Aktif
3	Muh. Rizal	MR	Bungaejaya	5	Sembako	Aktif
4	Nurhayati	N	Julubori	2	Sembako	Aktif
5	Amiruddin	A	Bungaejaya	4	Sembako	Aktif
6	Fitriani	F	Kampili	3	Sembako	Aktif
7	Syamsuddin	S	Julubori	6	Sembako	Aktif
8	Ramlah	R	Kampili	2	Sembako	Aktif
9	Zainal Abidin	ZA	Bontoramba	4	Sembako	Aktif
10	Hartini	H	Pallangga	3	Sembako	Aktif
11	Andi Muh. Akbar	AM	Jene'tallasa	5	Sembako	Aktif
12	Salmawati	S	Panakkukang	2	Sembako	Aktif
13	Nurdin	N	Bungaejaya	4	Sembako	Aktif
14	Suryani	S	Julupa'mai	3	Sembako	Aktif
15	Mustafa	M	Julupa'mai	5	Sembako	Aktif
16	Asriani	A	Julupa'mai	2	Sembako	Aktif
17	Hasbullah	H	Bontoala	6	Sembako	Aktif
18	Wahyuni	W	Jene'tallasa	4	Sembako	Aktif
19	Supriadi	S	Kampili	3	Sembako	Aktif
20	Nafsiah	N	Bungaejaya	5	Sembako	Aktif
21	Kaharuddin	K	Jene'tallasa	2	Sembako	Aktif
22	Erna Susanti	ES	Julukanaya	4	Sembako	Aktif
23	Rasyid	R	Jene'tallasa	3	Sembako	Aktif
24	Sri Wahyuni	SW	Bontoala	6	Sembako	Aktif
25	Basri	B	Bontoramba	2	Sembako	Aktif
26	Yuliana	Y	Bungaejaya	3	Sembako	Aktif
27	Umar Faruq	UF	Bontoramba	5	Sembako	Aktif
28	Marlina	M	Julukanaya	4	Sembako	Aktif
29	Sudirman	S	Bontoala	3	Sembako	Aktif
30	Hanifah	H	Bontoramba	5	Sembako	Aktif

Sumber: Dinas Sosial Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa Tahun 2025

Syarat-Syarat Penerima Bansos Sembako di Kelurahan Tetebatu,

Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa antara lain:

1. Terdaftar sebagai warga Kelurahan Tetebatu dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sah.
2. Masuk dalam kategori masyarakat miskin atau kurang mampu, sesuai dengan data yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang telah diverifikasi oleh pemerintah setempat.
3. Tidak menerima bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT), kecuali dalam kasus tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Memiliki penghasilan rendah atau berada dalam kondisi ekonomi sulit akibat kehilangan pekerjaan, sakit, atau faktor lainnya yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga.
5. Bersedia mengikuti proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pihak Kelurahan atau instansi terkait untuk memastikan kelayakan sebagai penerima bantuan.
6. Mengajukan permohonan atau rekomendasi dari Ketua RT/RW atau perangkat desa/kelurahan jika belum terdaftar dalam DTKS tetapi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
7. Tidak memiliki aset berharga yang signifikan, seperti kendaraan mewah, tanah luas, atau rumah di luar kategori rumah sederhana.
8. Mendukung transparansi dan kejujuran dalam pendataan, serta tidak melakukan manipulasi data atau memberikan informasi palsu demi mendapatkan bantuan.

9. Mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, serta bersedia mengikuti prosedur distribusi yang telah ditetapkan oleh pihak kelurahan atau dinas sosial.
10. Bersedia melaporkan jika terdapat penerima yang tidak memenuhi syarat, guna memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan Pembagian Bansos Sembako di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa:

1. Meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dengan menyediakan kebutuhan pokok bagi keluarga yang kurang mampu.
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi sulit, seperti pengangguran, kemiskinan ekstrem, atau bencana.
3. Mencegah kerawanan pangan dengan memastikan bahwa setiap keluarga penerima manfaat memiliki akses terhadap bahan makanan yang cukup dan bergizi.
4. Mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan dukungan kepada kelompok rentan agar dapat bertahan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
5. Mendukung program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah dan pusat melalui intervensi sosial yang tepat sasaran.
6. Membantu masyarakat yang terdampak krisis ekonomi atau bencana seperti pandemi, inflasi tinggi, atau bencana alam yang menyebabkan ketidakstabilan finansial.

7. Meningkatkan rasa kepedulian sosial dan kebersamaan dalam komunitas dengan memberikan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
8. Mendukung stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat lokal dengan mengurangi potensi konflik akibat ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar.
9. Menjamin bahwa bantuan sosial dikelola secara transparan dan tepat sasaran sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
10. Mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memastikan bahwa bantuan yang diberikan bisa menjadi stimulus untuk keberlanjutan kehidupan ekonomi mereka.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tentang implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial (Bansos) sembako bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa., keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat indikator ini menjadi faktor penentu efektivitas penyaluran bansos dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial (Bansos) sembako bagi

masyarakat miskin di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Bansos

Salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan bantuan sosial (Bansos) adalah komunikasi antara pemerintah daerah sebagai pelaksana program dan masyarakat penerima manfaat sebagai pihak yang membutuhkan bantuan tersebut. Komunikasi yang baik akan memastikan bahwa informasi mengenai bansos, mulai dari syarat penerima, mekanisme pendaftaran, jadwal distribusi, hingga tata cara pencairan, dapat tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat yang berhak. Selain itu, komunikasi yang efektif juga berperan dalam membangun transparansi dan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.

Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka akan timbul berbagai kendala dalam pelaksanaan program bansos, seperti ketidaktahuan masyarakat tentang hak mereka, kesalahan dalam pendataan penerima manfaat, atau bahkan potensi penyalahgunaan oleh oknum tertentu. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi, baik melalui media cetak, elektronik, maupun digital, agar informasi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Lebih dari sekadar penyampaian informasi satu arah, komunikasi dalam implementasi bantuan sosial (Bansos) juga mencakup aspek

keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan menyampaikan keluhan terkait program yang dijalankan. Dengan adanya komunikasi dua arah, pemerintah dapat lebih memahami kendala yang dihadapi masyarakat dan melakukan perbaikan agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, komunikasi yang baik bukan hanya menjadi faktor pendukung, tetapi juga merupakan kunci utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan bansos.

Hasil wawancara peneliti dengan seorang warga penerima bantuan sosial (Bansos) terkait informasi pembagian bantuan sosial di kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, warga menyatakan:

“Kadang informasi soal pembagian bantuan tidak sampai ke kami dengan jelas. Tahu-tahu sudah ada pembagian, dan banyak yang tidak kebagian karena tidak tahu kapan waktunya.” (Wawancara ZA, 06 Februari 2025).

Masyarakat menerima atau merespons komunikasi terkait bansos.

“Saya pernah mengalami kendala karena informasi bansos hanya diumumkan melalui grup WhatsApp, padahal tidak semua warga memiliki akses internet.” (Wawancara H, 06 Februari 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala yang signifikan dalam penyebaran informasi terkait jadwal dan mekanisme pembagian bansos, yang mengakibatkan sebagian warga tidak memperoleh bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka. Kurangnya akses terhadap informasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sarana komunikasi di tingkat kelurahan, minimnya sosialisasi dari pihak terkait, atau kurangnya pemanfaatan teknologi dalam penyebarluasan informasi.

Akibatnya, banyak warga yang tidak mengetahui kapan dan bagaimana mereka dapat menerima bantuan, sehingga berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam distribusi bansos. Beberapa penerima yang memiliki akses informasi yang lebih baik mungkin mendapatkan bantuan tepat waktu, sementara yang lain tertinggal atau bahkan tidak menerima sama sekali. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka tujuan utama dari kebijakan bantuan sosial (Bansos), yaitu memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, bisa tidak tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pelaksanaan bansos, seperti penggunaan media sosial, pemasangan pengumuman di tempat-tempat strategis, atau keterlibatan perangkat RT/RW dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang lebih baik, diharapkan setiap warga yang berhak menerima bansos dapat memperoleh informasi dengan jelas dan tepat waktu, sehingga bantuan dapat tersalurkan secara lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan seorang perangkat kelurahan yang telah melakukan berbagai upaya dalam menyampaikan informasi terkait pembagian bantuan sosial kepada masyarakat.

“Kami sudah berusaha menyampaikan informasi lewat pengumuman di kantor kelurahan dan grup WhatsApp, tapi tidak semua warga aktif mengakses informasi tersebut.” (Wawancara AD, 06 Februari 2025).

Hal ini menunjukkan meskipun pihak kelurahan telah berupaya menggunakan berbagai metode komunikasi, seperti pengumuman di

kantor kelurahan dan penyebaran informasi melalui grup whatsApp, masih terdapat kesenjangan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Tidak semua warga memiliki akses atau kebiasaan untuk mengikuti informasi melalui saluran tersebut, sehingga ada sebagian yang tertinggal dalam menerima pengumuman terkait jadwal dan mekanisme penyaluran bansos. Keterbatasan ini bisa diperparah dengan rendahnya literasi digital atau kurangnya perhatian terhadap informasi yang disampaikan.

Kesenjangan informasi ini berdampak pada ketimpangan dalam penerimaan bansos di masyarakat. Warga yang mendapatkan informasi dengan cepat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses bantuan, sementara yang tidak mengetahui pengumuman dapat kehilangan haknya. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif, seperti penyampaian informasi langsung melalui ketua RT/RW, pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis, serta pemanfaatan media massa lokal agar seluruh warga, terutama mereka yang tidak aktif dalam grup digital, tetap mendapatkan informasi

Sosialisasi kepada masyarakat merupakan langkah penting dalam penyebaran informasi terkait program bantuan sosial, namun peran RT dan RW juga dibutuhkan untuk memperluas jangkauan informasi. Hasil wawancara peneliti dengan seorang pendamping sosial mengungkapkan:

“Sosialisasi ke masyarakat memang penting, tapi kami juga butuh dukungan dari RT dan RW untuk menyebarkan informasi lebih luas.” (Wawancara AM, 06 Februari 2025).

Perspektif tambahan tentang peran pendamping dalam mendukung masyarakat memahami prosedur bansos.

“Sebagian masyarakat masih kurang memahami proses verifikasi data, sehingga sering terjadi kebingungan saat pencairan bansos.” (Wawancara AB, 06 Februari 2025).

Peran Dinas Sosial dalam penyelenggaraan bansos, kendala yang dihadapi, serta strategi peningkatan efektivitas komunikasi.

“Kami terus berupaya meningkatkan transparansi dan efektivitas distribusi bansos dengan melakukan sosialisasi yang lebih luas, termasuk melalui koordinasi dengan perangkat desa dan pendamping sosial melalui koran dan penyuluhan.” (Wawancara BG, 06 Februari 2025).

Hal ini menunjukkan Koordinasi antara pemerintah, pendamping sosial, dan aparat tingkat RT/RW menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa informasi mengenai bantuan sosial (bansos) dapat tersebar secara efektif dan merata ke seluruh masyarakat yang berhak. Setiap pihak memiliki peran strategis dalam proses ini. Pemerintah bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan serta menyediakan informasi yang akurat dan transparan mengenai jadwal, mekanisme, serta kriteria penerima bansos. Sementara itu, pendamping sosial berperan sebagai penghubung yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik oleh warga.

Di sisi lain, aparat tingkat RT/RW memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di lingkungan mereka, sehingga dapat berperan sebagai penyebar informasi yang lebih efektif, terutama bagi warga yang kurang memiliki akses terhadap media digital atau pengumuman resmi. Dengan adanya koordinasi yang kuat di antara ketiga pihak ini, proses penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan menyeluruh, sehingga meminimalisir kesenjangan informasi yang dapat

menghambat akses masyarakat terhadap bansos. Selain itu, koordinasi yang baik juga memungkinkan adanya umpan balik dari warga, yang dapat digunakan untuk memperbaiki mekanisme distribusi agar lebih efisien dan tepat sasaran.



Gambar 4.1 Koordinasi dengan perangkat desa dan pendamping sosial melalui penyuluhan

2. Sumber Daya dalam Implementasi Bansos

Implementasi bantuan sosial (Bansos) sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia, baik dalam bentuk anggaran, tenaga kerja, maupun fasilitas pendukung.

Dalam proses penyaluran bantuan sosial, keterbatasan tenaga kerja menjadi salah satu hambatan, terutama karena banyaknya penerima yang tersebar di berbagai wilayah. Hasil wawancara peneliti dengan seorang petugas Dinas Sosial menyebutkan:

“Kami punya keterbatasan tenaga dalam menyalurkan bansos, sementara jumlah penerima cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah.” (Wawancara BG, 06 Februari 2025).

Terbatasnya tenaga kerja menjadi kendala utama dalam pendistribusian bantuan sosial (Bansos) secara merata dan tepat waktu. Jumlah petugas yang terbatas dibandingkan dengan banyaknya penerima manfaat sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses distribusi. Selain itu, petugas yang harus menangani berbagai tugas administratif sekaligus turun langsung ke lapangan menghadapi beban kerja yang berat, sehingga efektivitas penyaluran bansos menjadi kurang optimal.

Kendala ini semakin diperparah jika distribusi bantuan sosial (Bansos) mencakup wilayah yang luas dengan akses transportasi yang sulit. Dalam beberapa kasus, keterlambatan ini membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, terutama bagi kelompok rentan yang sangat bergantung pada bantuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan solusi seperti penambahan tenaga relawan, optimalisasi sistem distribusi berbasis teknologi, serta koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat tepat waktu dan merata.

Terbatasnya tenaga kerja menjadi kendala utama dalam pendistribusian bantuan sosial (Bansos) secara merata dan tepat waktu. Jumlah petugas yang terbatas dibandingkan dengan banyaknya penerima manfaat sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses distribusi. Selain itu, petugas yang harus menangani berbagai tugas administratif

sekaligus turun langsung ke lapangan menghadapi beban kerja yang berat, sehingga efektivitas penyaluran bansos menjadi kurang optimal.

Seorang perangkat desa juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi di tingkat desa dalam proses penyaluran bansos:

“Koordinasi antara pihak desa dan Dinas Sosial masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal validasi data penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran.” (Wawancara AD, 06 Februari 2025).

Keterlambatan dalam penyaluran bantuan sosial dapat menimbulkan dampak ekonomi bagi penerima, seperti terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan harian. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga penerima bansos mengeluhkan:

“Kadang bantuan datang terlambat, dan kalau begitu kami harus berutang dulu untuk kebutuhan sehari-hari.” (Wawancara H, 06 Februari 2025).

Keterlambatan dalam pendistribusian bantuan memiliki dampak langsung terhadap ketahanan ekonomi masyarakat miskin yang sangat bergantung pada bansos sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pokok. Bagi banyak keluarga penerima manfaat, bansos berperan sebagai penyangga ekonomi yang membantu mereka bertahan dalam kondisi sulit. Ketika bantuan tidak diterima tepat waktu, mereka harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti berutang atau mengurangi konsumsi makanan dan kebutuhan esensial lainnya. Hal ini tidak hanya memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Selain itu, keterlambatan dalam distribusi bansos juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas program bantuan sosial pemerintah. Jika keterlambatan ini terus berulang tanpa ada perbaikan sistem, masyarakat dapat merasa diabaikan dan kehilangan harapan terhadap kebijakan yang seharusnya membantu mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme distribusi dengan memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan transparansi dalam penyaluran, serta memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses distribusi agar bantuan dapat diterima tepat waktu dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, warga lainnya juga menambahkan:

“Kami sangat bergantung pada bantuan ini, jadi kalau terlambat datang, kami benar-benar kesulitan mencukupi kebutuhan.”
(Wawancara ZA, 06 Februari 2025).

Keterbatasan kendaraan dan logistik menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kecepatan dan jangkauan distribusi bantuan sosial, terutama ke daerah terpencil. Hasil wawancara peneliti dengan seorang relawan distribusi bantuan mengatakan:

“Jika ada lebih banyak kendaraan dan logistik, mungkin distribusi bisa lebih cepat dan lebih banyak menjangkau daerah terpencil.”
(Wawancara AB, 06 Februari 2025).

Hal ini menunjukkan infrastruktur yang memadai, seperti kendaraan distribusi, akses jalan yang baik, serta fasilitas penyimpanan yang layak, memainkan peran krusial dalam efektivitas implementasi bantuan sosial (bansos). Kendaraan distribusi yang mencukupi memungkinkan bantuan dapat disalurkan lebih cepat dan menjangkau

seluruh penerima manfaat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit diakses. Tanpa infrastruktur yang memadai, distribusi bansos sering mengalami keterlambatan, terutama saat kondisi cuaca buruk atau dalam situasi darurat seperti bencana alam.

Selain itu, jalur distribusi yang baik juga membantu mengurangi risiko penumpukan bantuan di titik-titik tertentu akibat keterbatasan akses. Ketika distribusi bansos terhambat oleh kondisi jalan yang rusak atau kurangnya fasilitas transportasi, masyarakat miskin yang sangat bergantung pada bantuan ini menjadi pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur pendukung, seperti perbaikan jalan, optimalisasi logistik, dan pengelolaan rantai pasok yang efisien, sangat diperlukan agar bantuan sosial (Bansos) dapat tersalurkan dengan lebih cepat, merata, dan tepat sasaran.

Pendamping bansos yang bertugas di lapangan juga mengalami berbagai kendala, seperti yang disampaikan oleh salah satu pendamping:

“Kadang terjadi miskomunikasi antara kami sebagai pendamping dengan pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi bantuan, sehingga ada keterlambatan.” (Wawancara AM, 06 Februari 2025).

Hal ini menunjukkan infrastruktur yang memadai, seperti kendaraan distribusi, akses jalan yang baik, serta fasilitas penyimpanan yang layak, memainkan peran krusial dalam efektivitas implementasi bantuan sosial (bansos). Kendaraan distribusi yang mencukupi memungkinkan bantuan dapat disalurkan lebih cepat dan menjangkau seluruh penerima manfaat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit diakses. Tanpa infrastruktur yang memadai, distribusi

bansos sering mengalami keterlambatan, terutama saat kondisi cuaca buruk atau dalam situasi darurat seperti bencana alam.



Gambar 4.2 Sembako yang siap dibagikan ke masyarakat miskin keluarahan tetebatu

3. Disposisi/Sikap Pelaksana dalam Implementasi Bansos

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan program bansos.

Sikap petugas dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bervariasi, ada yang menunjukkan pelayanan yang baik, tetapi ada pula yang kurang responsif dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.

Seorang warga menyatakan:

“Ada petugas yang sangat membantu, tapi ada juga yang terkesan cuek dan hanya menjalankan tugas seadanya.” (Wawancara H, 06 Februari 2025).

Pendamping bansos lain mengatakan:

“Beberapa warga kurang memahami mekanisme seleksi penerima bansos. Kami sudah berusaha memberikan penjelasan, tetapi tetap

ada ketidakpuasan, terutama jika ada perubahan data yang tidak mereka pahami..” (Wawancara AM, 06 Februari 2025).

Sikap dan etos kerja pelaksana bansos bervariasi, sehingga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan. Beberapa petugas menunjukkan dedikasi tinggi dengan bekerja secara profesional dan transparan, memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Namun, ada pula yang kurang responsif, hanya menjalankan tugas seadanya, atau bahkan terkesan abai terhadap keluhan masyarakat. Perbedaan ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan penerima manfaat, terutama bagi mereka yang merasa kurang diperhatikan dalam proses distribusi.

Ketidakteraturan dalam kinerja pelaksana dapat menimbulkan kesenjangan dalam implementasi kebijakan bantuan sosial (Bansos). Masyarakat yang mengalami pelayanan buruk cenderung kehilangan kepercayaan terhadap program bantuan, meskipun secara keseluruhan kebijakan tersebut bertujuan baik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang ketat serta peningkatan kapasitas dan motivasi bagi para pelaksana agar mereka dapat bekerja dengan lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Dalam proses pendataan penerima bantuan, pihak kelurahan berupaya menjaga transparansi dan keadilan, meskipun tetap muncul persepsi negatif dari sebagian warga. Hasil wawancara peneliti dengan seorang perangkat desa menjelaskan:

“Kami sebisa mungkin transparan dan adil dalam mendata penerima bantuan, tapi ada warga yang menganggap kami pilih kasih.” (Wawancara AD, 06 Februari 2025).

Pihak dinas sosial juga menyatakan:

“Kami terus berupaya agar bansos tepat sasaran dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, dalam pelaksanaannya memang ada tantangan, seperti keterbatasan data terbaru dan persepsi masyarakat yang menganggap ada ketidakadilan.” (Wawancara BG, 06 Februari 2025).

Adanya kesalahpahaman di masyarakat sering kali menjadi tantangan bagi pelaksana bansos dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Beberapa warga mungkin merasa bahwa distribusi bantuan tidak adil atau ada pihak yang lebih diutamakan, meskipun data penerima telah ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Kurangnya pemahaman ini bisa disebabkan oleh minimnya sosialisasi terkait mekanisme seleksi penerima, perubahan kebijakan yang tidak tersampaikan dengan jelas, atau keterbatasan akses informasi di kalangan masyarakat tertentu.

Kesalahpahaman ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan, tetapi juga dapat menyebabkan ketegangan antara warga dan pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos). Dalam beberapa kasus, petugas lapangan menghadapi protes atau tuduhan pilih kasih, meskipun mereka hanya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih intensif dan transparan, seperti pengumuman terbuka, musyawarah dengan warga, serta keterlibatan aparat tingkat RT/RW untuk menjelaskan mekanisme

penyaluran bansos agar masyarakat lebih memahami dan menerima kebijakan dengan baik.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, sebagian besar petugas menunjukkan dedikasi dan niat baik, namun masih ada yang bekerja secara formalitas tanpa kepedulian yang memadai. Hasil wawancara peneliti dengan seorang penerima bansos mengungkapkan:

“Sebagian besar petugas bekerja dengan niat baik, tapi memang ada yang kurang peduli dan hanya sekedar menjalankan perintah.” (Wawancara ZA, 06 Februari 2025).

Pendamping bansos juga menyatakan:

Kami berusaha tetap profesional dan menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah desa. Namun, perlu ada evaluasi berkala agar pelayanan bisa lebih merata dan semua petugas bekerja dengan standar yang sama. (Wawancara ZA, 06 Februari 2025).

Hal ini menunjukkan pelaksanaan bantuan sosial (Bansos) sangat bergantung pada integritas dan kesungguhan petugas dalam menjalankan tugasnya, karena mereka memiliki peran krusial dalam memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran dan transparan. Jika petugas bekerja dengan dedikasi dan kejujuran, maka program bansos dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebaliknya, jika terdapat kelalaian, ketidaktepatan dalam pendataan, atau bahkan indikasi penyalahgunaan wewenang, maka kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ini dapat menurun, dan bantuan yang seharusnya diterima oleh mereka yang berhak justru bisa disalahgunakan.

Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan dalam setiap tahap penyaluran bansos. Pemerintah perlu mengimplementasikan mekanisme evaluasi berkala, sistem pelaporan masyarakat, serta sanksi tegas bagi petugas yang terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, transparansi dalam pendistribusian bantuan, seperti publikasi data penerima dan pelibatan komunitas lokal dalam pengawasan, dapat menjadi langkah efektif untuk memastikan bahwa bantuan sosial (Bansos) dikelola dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab.



Gambar 4.3 Tahap Penyaluran Bansos ke masyarakat miskin di salah satu Kelurahan Tetebaru

4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Bansos

Struktur birokrasi yang kompleks sering kali menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Proses pencairan bantuan sosial masih menghadapi kendala birokrasi yang rumit, sehingga warga harus bolak-balik ke kantor

kelurahan untuk mengurus dokumen. Hasil wawancara peneliti dengan seorang penerima bantuan sosial (Bansos) mengeluhkan:

“Proses pencairan bantuan sering berbelit-belit. Kadang harus ke kantor kelurahan berkali-kali untuk mengurus dokumen.” (Wawancara H, 06 Februari 2025).

Masyarakat lain mengatakan:

“Prosesnya cukup rumit. Saya harus datang ke kelurahan beberapa kali untuk melengkapi dokumen, dan sering kali petugas tidak memberi penjelasan yang jelas.” (Wawancara ZA, 06 Februari 2025)

Birokrasi yang rumit sering kali menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam mengakses bantuan sosial (Bansos) yang seharusnya mudah diterima. Proses administrasi yang panjang, persyaratan dokumen yang berbelit, serta ketidakjelasan prosedur sering kali membuat warga kesulitan dalam mendapatkan hak mereka. Kondisi ini semakin menyulitkan bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, atau masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, yang mungkin tidak memiliki pemahaman atau akses yang cukup untuk mengurus berbagai persyaratan administratif.

Akibatnya, banyak masyarakat yang akhirnya menyerah dalam mengurus bantuan atau terpaksa mencari jalur alternatif yang tidak jarang melibatkan biaya tambahan atau bahkan praktik percaloan. Padahal, tujuan utama bansos adalah memberikan kemudahan dan perlindungan bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dalam program bansos sangat diperlukan, misalnya dengan penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan, serta peningkatan transparansi dalam pengurusan

bantuan, sehingga bansos dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran.

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dilakukan sesuai aturan yang berlaku, namun perubahan regulasi yang sering terjadi menyebabkan proses menjadi lebih lama dan kompleks. Seorang petugas kelurahan menjelaskan:

“Kami hanya menjalankan aturan yang ada, tapi memang kadang regulasi yang berubah-ubah membuat proses jadi lebih panjang.” (Wawancara AD, 06 Februari 2025).

Pendamping bansos mengatakan:

“Sangat besar. Salah satu tantangan utamanya adalah data penerima yang kadang tidak akurat. Ada warga yang masih terdaftar sebagai penerima padahal mereka sudah tidak memenuhi syarat, sementara yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar.” (Wawancara AB, 06 Februari 2025).

Fleksibilitas dalam kebijakan sangat dibutuhkan agar pelaksanaan bansos dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, kondisi di lapangan sering kali berbeda dari yang direncanakan, seperti perubahan jumlah penerima manfaat, kendala teknis dalam distribusi, atau situasi darurat seperti bencana alam yang memerlukan penyesuaian segera. Jika kebijakan terlalu kaku dan prosedur administrasi terlalu rumit, maka bantuan yang seharusnya cepat tersalurkan justru terhambat oleh mekanisme birokrasi yang tidak fleksibel.

Dengan adanya kebijakan yang lebih adaptif, pemerintah dapat dengan cepat menyesuaikan mekanisme bansos sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya, dengan memberikan jalur khusus bagi masyarakat

yang belum terdata tetapi memenuhi kriteria penerima manfaat atau mempercepat pencairan bantuan dalam situasi mendesak. Selain itu, kebijakan yang lebih fleksibel juga memungkinkan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, sehingga program bansos tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu kendala dalam penyaluran bantuan sosial adalah banyaknya warga yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga diperlukan proses verifikasi ulang yang memakan waktu. Seorang staf Dinas Sosial menambahkan:

“Banyak warga yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jadi kami harus melakukan verifikasi ulang yang memakan waktu.” (Wawancara BG, 06 Februari 2025).

Pendamping bansos mengatakan:

“Banyak warga yang kesulitan mengurus persyaratan administrasi. Mereka harus bolak-balik ke kelurahan karena kurangnya informasi atau ada dokumen yang kurang lengkap.” (Wawancara AM, 06 Februari 2025).

Hal ini menunjukkan validasi data penerima bansos merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak dan menghindari kesalahan distribusi. Dengan adanya proses validasi yang ketat, pemerintah dapat mencegah bantuan jatuh ke tangan pihak yang tidak memenuhi kriteria atau terjadi tumpang tindih penerima manfaat. Selain itu, data yang akurat juga membantu dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan, sehingga program bansos dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

Namun, jika proses validasi terlalu lama dan berbelit, masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan bisa mengalami keterlambatan dalam penerimaan, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Bagi mereka yang bergantung pada bansos untuk memenuhi kebutuhan dasar, keterlambatan ini dapat berdampak serius terhadap ketahanan ekonomi dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara akurasi validasi dan kecepatan penyaluran bantuan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pendataan, melakukan pemutakhiran data secara berkala, serta menyederhanakan proses verifikasi tanpa mengurangi aspek transparansi dan akuntabilitas.



Gambar 4.4 Pendistribusian sembako masyarakat kelurahan Tetebatu kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Pembahasan dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) berupa sembako terhadap masyarakat miskin Kelurahan Tetebatu Kecamatan

Palangga Kabupaten Gowa yang akan dikaji menggunakan indikator implementasi antara lain Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi (Edward III, 1980).

1. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Bansos

Dalam teori implementasi kebijakan, komunikasi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik (Edward III, 1980). Komunikasi yang efektif memastikan bahwa kebijakan dipahami oleh para pelaksana dan masyarakat yang menjadi sasaran. Kejelasan informasi, saluran komunikasi yang tepat, serta keterlibatan berbagai pihak dalam penyebaran informasi adalah elemen kunci dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penyebaran informasi terkait bansos di Kelurahan Tetebaru. Beberapa warga tidak menerima informasi secara jelas mengenai jadwal dan mekanisme pembagian bantuan, yang menyebabkan sebagian dari mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh haknya. Hal ini sejalan dengan teori Edward III yang menyatakan bahwa komunikasi yang tidak efektif dapat menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan. Kesenjangan informasi ini disebabkan oleh keterbatasan akses warga terhadap media komunikasi yang digunakan oleh pemerintah, seperti WhatsApp atau pengumuman di kantor kelurahan.

Selain itu, teori komunikasi dalam kebijakan publik juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah, di mana masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterlibatan perangkat RT/RW dalam menyebarkan informasi dapat membantu mengatasi kesenjangan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan komunikasi dua arah dapat meningkatkan efektivitas implementasi bansos, terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat yang sulit mengakses informasi melalui media digital.

Komunikasi dalam implementasi bansos di Kelurahan Tetebaru masih belum optimal dan memerlukan perbaikan. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas komunikasi dengan memanfaatkan berbagai saluran yang lebih inklusif, seperti sosialisasi langsung, penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik, serta keterlibatan aktif dari tokoh masyarakat. Dengan komunikasi yang lebih baik, diharapkan penerima manfaat bantuan sosial (Bansos) dapat memperoleh informasi secara tepat waktu dan kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori Edward III, yang menggarisbawahi bahwa komunikasi yang jelas dan terarah akan meningkatkan efektivitas kebijakan.

2. Sumber Daya dalam Implementasi Bantuan Sosial (Bansos)

Teori implementasi kebijakan menegaskan bahwa sumber daya merupakan elemen kunci dalam keberhasilan suatu kebijakan (Edward III,

1980). Sumber daya mencakup tenaga kerja, anggaran, sarana dan prasarana, serta informasi yang diperlukan dalam menjalankan kebijakan secara efektif. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan akan menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan dalam distribusi, ketidaktepatan sasaran, atau bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga kerja menjadi kendala utama dalam pendistribusian bantuan sosial (Bansos) di Kelurahan Tetebatu. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan banyaknya penerima manfaat menyebabkan keterlambatan dalam proses penyaluran. Hal ini sejalan dengan teori Edward III yang menyatakan bahwa ketersediaan tenaga kerja yang cukup dan terlatih sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, terbatasnya infrastruktur seperti kendaraan dan akses jalan yang kurang memadai juga menjadi faktor penghambat dalam distribusi bantuan sosial (Bansos), terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Dalam teori manajemen sumber daya, optimalisasi tenaga kerja dan sarana distribusi menjadi aspek penting dalam meningkatkan efisiensi implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan relawan dan perbaikan sistem logistik dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik antarinstansi serta pemanfaatan teknologi untuk

mempercepat proses distribusi, bantuan sosial dapat tersalurkan secara lebih tepat waktu dan merata.

Berdasarkan temuan penelitian, sumber daya dalam implementasi bantuan sosial (Bansos) di Kelurahan Tetebatu masih belum optimal. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap ketersediaan tenaga kerja, memperbaiki infrastruktur distribusi, serta meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran. Dengan perbaikan dalam aspek sumber daya, diharapkan distribusi bantuan sosial (Bansos) dapat berjalan lebih lancar dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan teori Edward III, yang menyatakan bahwa kekurangan sumber daya akan menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya agar bantuan sosial (Bansos) dapat tersalurkan dengan lebih efektif dan tepat waktu.

3. Disposisi/Sikap Pelaksana dalam Implementasi Bantuan Sosial (Bansos)

Dalam teori implementasi kebijakan, disposisi atau sikap pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan (Edward III, 1980). Sikap pelaksana mencerminkan sejauh mana mereka memiliki komitmen dalam menjalankan kebijakan dengan baik. Jika pelaksana memiliki sikap positif dan memahami tujuan kebijakan, maka implementasi akan berjalan lebih efektif. Sebaliknya, jika terdapat ketidakpedulian atau kurangnya

komitmen dari pelaksana, maka kebijakan dapat mengalami berbagai kendala.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam sikap dan etos kerja pelaksana bantuan sosial (Bansos) di Kelurahan Tetebaru. Beberapa petugas bekerja dengan penuh dedikasi dan transparansi, sementara yang lain hanya menjalankan tugas secara formal tanpa menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat penerima bantuan sosial (Bansos). Hal ini sejalan dengan teori Edward III yang menyatakan bahwa sikap pelaksana yang tidak seragam dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Ketidakteraturan ini juga dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat, terutama jika mereka merasa ada ketidakadilan dalam proses distribusi bantuan sosial (Bansos).

Selain itu, dalam teori administrasi publik, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kesalahpahaman di masyarakat terkait proses distribusi bantuan sosial (Bansos) dapat menjadi tantangan bagi pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dan sikap profesional dari pelaksana sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan bantuan sosial (Bansos).

Dengan demikian, disposisi pelaksana dalam implementasi bantuan sosial (Bansos) di Kelurahan Tetebaru masih perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu melakukan pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam

distribusi bantuan sosial (Bansos) serta menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua pelaksana bekerja dengan profesionalisme dan tanggung jawab. Dengan demikian, implementasi bantuan sosial (Bansos) dapat berjalan lebih adil dan transparan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Temuan ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana bantuan sosial (Bansos) di Kelurahan Tetebatu masih belum sepenuhnya optimal, sehingga tidak sepenuhnya sejalan dengan teori Edward III yang menekankan pentingnya sikap proaktif dan profesionalisme dalam implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Bantuan Sosial (Bansos)

★ Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan sistem administrasi, regulasi, dan mekanisme organisasi yang digunakan untuk menjalankan kebijakan (Edward III, 1980). Struktur birokrasi yang baik akan mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, sementara birokrasi yang kaku dan berbelit-belit dapat menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan sosial. Efisiensi birokrasi sangat diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan dengan cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi yang kompleks dalam pendistribusian bantuan sosial (Bansos) di Kelurahan Tetebatu menjadi salah satu faktor yang menghambat kelancaran implementasi

kebijakan. Proses pencairan bantuan yang berbelit sering kali membuat masyarakat kesulitan dalam memperoleh hak mereka. Hal ini sejalan dengan teori administrasi publik yang menyatakan bahwa birokrasi yang terlalu rigid dapat memperlambat efektivitas kebijakan dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat penerima manfaat.

Selain itu, teori Mazmanian dan Sabatier menekankan bahwa fleksibilitas dalam kebijakan diperlukan agar implementasi dapat berjalan lebih responsif terhadap kondisi di lapangan (Mazmanian & Paul, 1983). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sering kali perubahan regulasi yang mendadak atau ketidakjelasan prosedur membuat masyarakat bingung dan kesulitan dalam mengakses bantuan sosial (Bansos). Oleh karena itu, diperlukan sistem birokrasi yang lebih adaptif agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tidak menyulitkan masyarakat.

Struktur birokrasi dalam implementasi bantuan sosial (Bansos) di Kelurahan Tetebatu masih perlu diperbaiki. Penyederhanaan prosedur administrasi, pemanfaatan teknologi digital dalam pendataan, serta peningkatan transparansi dalam proses verifikasi data dapat menjadi langkah yang efektif untuk memperbaiki sistem birokrasi. Dengan reformasi birokrasi yang lebih efisien, diharapkan program bantuan sosial (Bansos) dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dalam hal ini, penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi bantuan sosial (Bansos) di Kelurahan Tetebatu masih belum cukup fleksibel, sehingga kurang sesuai dengan prinsip efektivitas

implementasi kebijakan sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Edward

III.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) berupa sembako terhadap masyarakat miskin Kelurahan Tetebatu Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa dapat disimpulkan sebagai berikut:

Komunikasi dalam implementasi bantuan sosial (Bansos) di Kelurahan Tetebatu masih belum optimal dan memerlukan perbaikan. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas komunikasi dengan memanfaatkan berbagai saluran yang lebih inklusif, seperti sosialisasi langsung, penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik, serta keterlibatan aktif dari tokoh masyarakat. Dengan komunikasi yang lebih baik, diharapkan penerima manfaat bantuan sosial (Bansos) dapat memperoleh informasi secara tepat waktu dan kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Sumber daya dalam implementasi bantuan sosial (Bansos) di Kelurahan Tetebatu masih belum optimal. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap ketersediaan tenaga kerja, memperbaiki infrastruktur distribusi, serta meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran. Dengan perbaikan dalam aspek sumber daya, diharapkan distribusi bantuan sosial (Bansos) dapat berjalan lebih lancar dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Disposisi pelaksana dalam implementasi bantuan sosial (Bansos) di Kelurahan Tetebatu masih perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu melakukan pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam distribusi bantuan sosial (Bansos) serta menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua pelaksana bekerja dengan profesionalisme dan tanggung jawab. Dengan demikian, implementasi bantuan sosial (Bansos) dapat berjalan lebih adil dan transparan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Struktur birokrasi dalam implementasi bantuan sosial (Bansos) di Kelurahan Tetebatu masih perlu diperbaiki. Penyederhanaan prosedur administrasi, pemanfaatan teknologi digital dalam pendataan, serta peningkatan transparansi dalam proses verifikasi data dapat menjadi langkah yang efektif untuk memperbaiki sistem birokrasi. Dengan reformasi birokrasi yang lebih efisien, diharapkan program bantuan sosial (Bansos) dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam serta solusi konkret dalam meningkatkan efektivitas program bantuan sosial (Bansos).

2. Bagi Instansi

Program bantuan sosial (Bansos) dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin serta meningkatkan efektivitas kebijakan sosial di daerah tersebut. Serta sebagai pendamping pemberian bantuan sosial harus lebih efektif lagi agar pembagian terhadap masyarakat lebih merata dan terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, L. D. (2024). *Implementasi Perda Nomor 8 Pasal 3 Tahun 2020 Tentang Bangunan Gedung Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah*. (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno).
- Ardhana Januar Mahardhani. (2018). *Advokasi Kebijakan Publik*. Penerbit CALINA MEDIA.
- Asrulla, A., Risnita, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.
- Choiriyah, C. (2018). Implementasi kebijakan publik dalam penanganan kemiskinan; Studi implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 17–30.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Girsang, L. R., & Situmeang, I. O. (2016). Implementasi Difusi Inovasi Pada Sistem Sosial Terkait Dengan Penggunaan E-Ticketing Sebagai Pengganti Pembayaran Tunai dan Sistem Antri (Survei Pada Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia Sebagai Pengguna Moda Transportasi Commuter Line. *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 8(2).
- Gowa. (2024). Pemkab Gowa Bersama Polda Sulsel Salurkan 4.000 Paket Sembako ke Masyarakat. *Sulselprov.Go.Id*.
- Gunarta, I. K. (2017). Implementasi Pembelajaran Yoga Dalam Meningkatkan Konsentrasi Belajar Di Sekolah Dasar Negeri 1 Sumerta. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(2), 180–189.
- Husna, N. (2014). Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1).
- Kusnasari, Sri, Azlan, & Berlianta Esterlina Br Tarigan. (2021). Klasifikasi Masyarakat Miskin Layak Menerima Bantuan Sosial. *Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika Dan Komputer)*, 20(2), 167–173.
- Laloan, R. I., POSUMAH, J., & Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(101).
- Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *JUSTISI*, 8(2), 95–107.

- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324–334.
- Mazmanian, D. A., & Paul, A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public. Policy*, Scott Foresman and Company.
- Midgley, J. (2000). Globalization, Capitalism and Sosial Welfare: A Sosial Development Perspective. *Canadian Sosial Work, Special Issue: Sosial Work and Globalization*, 2(1), 13–28.
- Muhassin, M., & Yasin, S. (2024). *Sosialisasi Bansos Di Era New Normal Di Desa Olean Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo*. In Prosiding Seminar Nasional UNARS.
- PERDA. (2022). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023* (Patent Pasal 8).
- Rozak, A., & Az-Ziyadah, A. I. (2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia. *Alim: Journal of Islamic Education*, 3(2), 197–208.
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax*, 2(6), 27.
- Sri Lestari Rahayu. (2012). *Bantuan Sosial di Indonesia*. Fokus Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Pratama.
- Suud, Mohammad. (2006). *Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Prestasi.
- Taufiqurokhman, T. (2017). Implementasi Kebijakan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Tangerang Selatan. *SPEKTRUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(2).
- Umi, K., Susilowati, A., Utama, M. I. P., & Eva, S. (2023). *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Di Universitas Baturaja*. (Doctoral dissertation, Universitas Baturaja).
- Wahidah, A. Z., Widayani, A., Wardani, S. I., Rachmawati, I., & Latifah, N. (2022). Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. *Competence: Journal of Management Studies*, 16(1), 51–63.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.

Yusran Lapananda. (2013). *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD*. Sinar Grafika.



LAMPIRAN



Lampiran 1**PERMINTAAN MENJADI INFORMAN**

Kepada Yth.

Seluruh Calon Informan

Di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Palangga Kab. Gowa Tahun 2025

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar:

Nama : Marindah Lestari

NIM : 105611122918

Akan mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Tetebatu Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa”.

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi siapapun. Kerahasiaan seluruh informasi yang didapatkan akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Tidak ada paksaan dalam keikutsertaan menjadi informan penelitian. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu sebagai informan dalam penelitian ini, jika Bapak/Ibu bersedia menjadi informan saya mohon Bapak/Ibu menandatangani lembar persetujuan dan menjawab pertanyaan pada lembar identitas informan yang telah disediakan, serta menjawab pertanyaan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti,

Marindah Lestari

Lampiran 2

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Setelah mendapat penjelasan dan saya memahami bahwa penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Tetebatu Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa” ini tidak merugikan saya dan telah dijelaskan secara jelas tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, cara pengisian kuesioner dan kerahasiaan data. Oleh karena itu, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Usia :

Alamat :

Menyatakan bersedia turut berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian yang akan dilakukan oleh Marindah Lestari, Mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Demikian lembar persetujuan ini saya isi dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, Februari 2025

Responden

(.....)

Lampiran 3**WAWANCARA****IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL (BANSOS) BAGI MASYARAKAT MISKIN
KELURAHAN TETEBA TU KECAMATAN PALANGGA
KABUPATEN GOWA****Responden yang terhormat,**

Perkenalkan saya Marindah Lestari dari mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kesediaan Anda karena Anda telah menjadi responden dan bersedia untuk mengisi kuesioner yang sudah kami sediakan. Kesediaan anda dalam mengisi kuesioner ini akan sangat membantu saya, Terima Kasih.

A. Pertanyaan**1. Wawancara dengan Dinas Sosial (DINSOS) (3 Orang)****a. Komunikasi**

- 1). Bagaimana proses penyampaian informasi terkait kebijakan Bansos kepada masyarakat?
- 2). Media atau metode apa yang digunakan dalam sosialisasi program Bansos?
- 3). Apakah ada kendala dalam penyampaian informasi kepada masyarakat? Jika ada, bagaimana solusinya?
- 4). Bagaimana koordinasi antara Dinas Sosial dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam implementasi kebijakan Bansos?

b. Sumber Daya

- 1). Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dalam

pelaksanaan kebijakan Bansos? Apakah jumlahnya mencukupi?

- 2). Apakah ada pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi petugas yang menangani program Bansos?
 - 3). Bagaimana alokasi anggaran untuk program Bansos? Apakah anggaran mencukupi untuk menjalankan kebijakan ini dengan optimal?
 - 4). Apa kendala yang dihadapi dalam aspek sumber daya dan bagaimana upaya mengatasinya?
- c. Disposisi/Sikap Pelaksana
- 1). Bagaimana sikap dan komitmen pelaksana kebijakan dalam menyalurkan Bansos kepada masyarakat?
 - 2). Apakah ada kendala dalam proses verifikasi dan validasi data penerima Bansos?
 - 3). Bagaimana transparansi dalam penyaluran Bansos?
 - 4). Apa upaya yang dilakukan untuk memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan?
- d. Struktur Birokrasi
- 1). Bagaimana mekanisme kerja dan alur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan Bansos?
 - 2). Apakah ada kendala dalam koordinasi antara berbagai level pemerintahan dan unit kerja terkait?
 - 3). Sejauh mana regulasi yang ada mendukung efektivitas implementasi kebijakan Bansos?
 - 4). Apakah ada kebijakan atau prosedur yang perlu diperbaiki dalam struktur birokrasi ini?

2. Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Tetebatu (5 Orang)

a. Indikator: Komunikasi

- 1). Bagaimana Anda mengetahui informasi terkait program Bansos?
- 2). Apakah Anda merasa mendapatkan informasi yang jelas mengenai program Bansos?
- 3). Apakah ada kendala dalam memperoleh informasi terkait

kebijakan ini?

b. Indikator: Sumber Daya

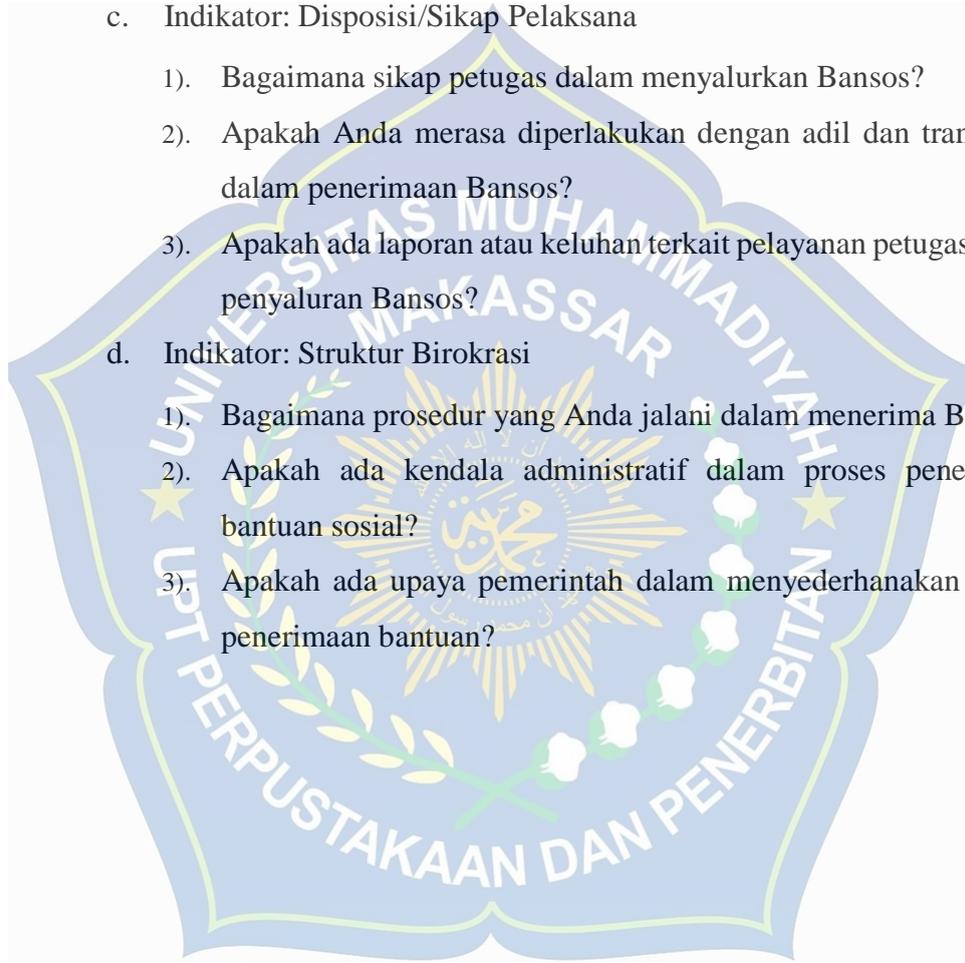
- 1). Apakah bantuan sosial yang diterima sesuai dengan kebutuhan dan harapan Anda?
- 2). Bagaimana kualitas dan jumlah bantuan sosial yang diterima?
- 3). Apakah ada kendala dalam pencairan atau penyaluran bantuan?

c. Indikator: Disposisi/Sikap Pelaksana

- 1). Bagaimana sikap petugas dalam menyalurkan Bansos?
- 2). Apakah Anda merasa diperlakukan dengan adil dan transparan dalam penerimaan Bansos?
- 3). Apakah ada laporan atau keluhan terkait pelayanan petugas dalam penyaluran Bansos?

d. Indikator: Struktur Birokrasi

- 1). Bagaimana prosedur yang Anda jalani dalam menerima Bansos?
- 2). Apakah ada kendala administratif dalam proses penerimaan bantuan sosial?
- 3). Apakah ada upaya pemerintah dalam menyederhanakan proses penerimaan bantuan?



Lampiran 4



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail:lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 6155/05/C.4-VIII/II/1446/2025

10 February 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

11 Sya'ban 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: Q169/FSP/A.5-VIII/II/1446 H/2025 M tanggal 10 Februari 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MARINDAH LESTARI

No. Stambuk : 10561 1122918

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS) BAGI MASYARAKAT MISKIN KELURAHAN TETEBATU KECAMATAN PALNGGA KABUPATEN GOWA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 Februari 2025 s/d 13 April 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muhsin Briel Muhsin, M.Pd.

NBM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 3332/S.01/PTSP/2025	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 6155/05/C.4-VIII/II/1446/2025 tanggal 10 Februari 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: MARINDAH LESTARI
Nomor Pokok	: 105611122918
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" DAMPAK KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS) TERHADAP MASYARAKAT
MISKIN KELURAHAN TETEBATU KECAMATAN PALANGGA KAB GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Mei s/d 11 Oktober 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



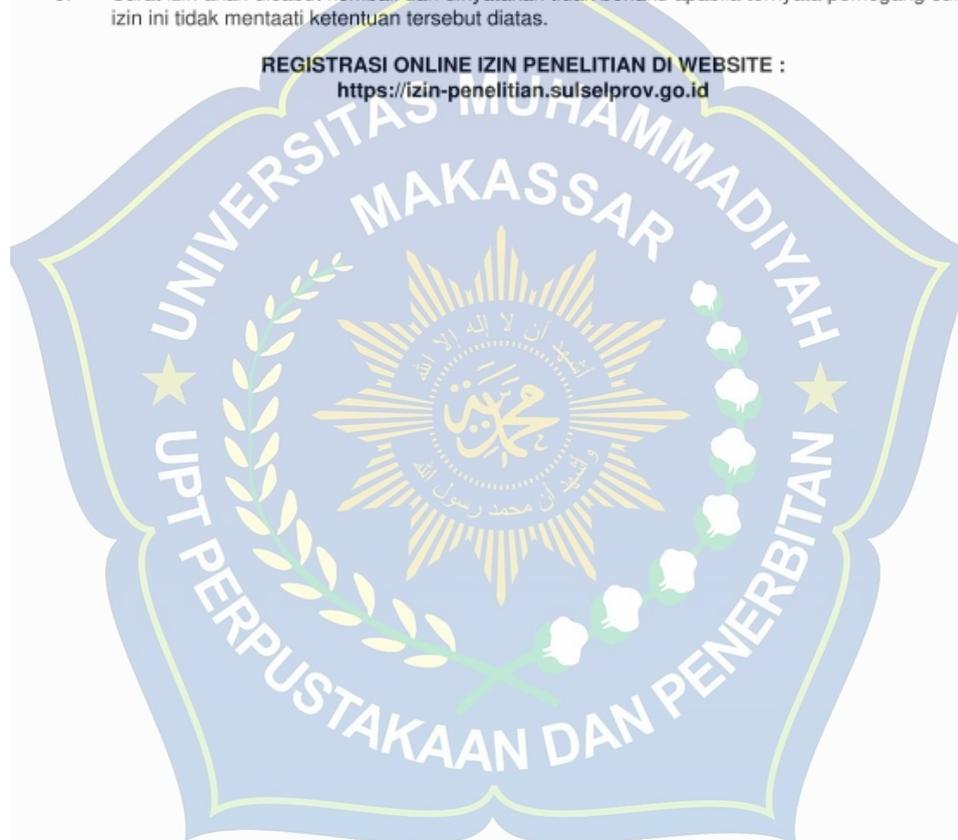
ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

Nomor: 3332/S.01/PTSP/2025

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

NOMOR REGISTRASI 20250211200889



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



DOKUMENTASI PENELITIAN

Dinas Sosial dalam Pembagian Bantuan Sosial (Bansos) Sembako pada tanggal 06
Februari 2025



Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Sembako ke Masyarakat Kelurahan
Tanatebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa pada tanggal 06
Februari 2025



Dinas Sosial dalam Pembagian Bantuan Sosial (Bansos) Sembako pada tanggal 06
Februari 2025



Wawancara Dengan Andi Baso Gazali, S.Sos., M.Si Selaku Dinas Sosial di
Kelurahan Tanatebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa Pada tanggal, 06
Februari 2024

Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Marindah Lestari
Nim : 105611122918
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	21%	25 %
3	Bab 3	9%	10 %
4	Bab 4	9%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 Januari 2025
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursyah S. Hum., M.I.P
NBM. 944 591

Bab I MARINDAH LESTARI

105611122918

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Feb-2025 04:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 2592783517

File name: BAB_I_-_2025-02-19T161515.497.docx (17.25K)

Word count: 855

Character count: 6150

Bab I MARINDAH LESTARI 105611122918

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.kalbis.ac.id Internet Source	3%
2	www.coursehero.com Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	2%
4	123dok.com Internet Source	2%
5	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	2%

Exclude quotes Of Exclude matches 2%

Exclude bibliography Of



Bab II MARINDAH LESTARI

105611122918

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Feb-2025 04:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 2592783844

File name: BAB_II_2025-02-19T161513.100.docx (52.27K)

Word count: 3953

Character count: 27865

Bab II MARINDAH LESTARI 105611122918

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	repository.uma.ac.id Internet Source	6%
2	123dok.com Internet Source	3%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
4	ojs.stiami.ac.id Internet Source	2%
5	ejournal.mandalanursa.org Internet Source	2%
6	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	2%
7	lib.ui.ac.id Internet Source	2%
8	Submitted to Universitas Cendrawasih Student Paper	2%
9	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Bab III MARINDAH LESTARI

105611122918

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Feb-2025 04:21PM (UTC+0700)

Submission ID: 2592783947

File name: BAB_III_-_2025-02-19T161513.024.docx (17.06K)

Word count: 883

Character count: 6094

Bab III MARINDAH LESTARI 105611122918

ORIGINALITY REPORT

9%	 11%	9%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	 jurnal.unprimdn.ac.id Internet Source	4%
2	Ester Flora Diana Hasibuan, Lucky O. H. Dotulong, Yantje Uhing. "DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MAHAKARYA CIPTA NUSANTARA TIMIKA PAPUA", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2023 Publication	3%
3	journal.unesa.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches Off

Bab IV MARINDAH LESTARI

105611122918

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Feb-2025 04:21PM (UTC+0700)

Submission ID: 2592784087

File name: BAB_IV_-_2025-02-19T161510.688.docx (31.43K)

Word count: 4626

Character count: 31990

Bab IV MARINDAH LESTARI 105611122918

ORIGINALITY REPORT

9%	8%	2%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1%
2	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1%
3	geograf.id Internet Source	<1%
4	repositori.uin-alaudidin.ac.id Internet Source	<1%
5	core.ac.uk Internet Source	<1%
6	es.scribd.com Internet Source	<1%
7	repository.its.ac.id Internet Source	<1%
8	Submitted to Defense University Student Paper	<1%
9	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
10	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1%
11	www.kodim1612manggarai.biz.id Internet Source	<1%
12	idoc.tips Internet Source	<1%
	repository.poltekeskupang.ac.id	

13	Internet Source	<1 %
14	tekno.nasional.news Internet Source	<1 %
15	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1 %
16	megapolitan.kompas.com Internet Source	<1 %
17	sawitindonesia.com Internet Source	<1 %
18	Meinyana, Sari Viciawati Machdum. "POTENSI PENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR: STUDI KASUS DI KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON", Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 2020 Publication	<1 %
19	akujugaanakbangsa.wordpress.com Internet Source	<1 %
20	majalahintrust.com Internet Source	<1 %
21	repo.stikesperintis.ac.id Internet Source	<1 %
22	www.ambon.go.id Internet Source	<1 %
23	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
24	desapinter.wordpress.com Internet Source	<1 %
25	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
26	docplayer.info Internet Source	<1 %

		<1 %
27	ejournal.iainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
28	id.123dok.com Internet Source	<1 %
29	ninafitriana9.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
31	revitalisasikawasan-upn.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	rppkompli.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
34	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
35	zukhrufarisma.wordpress.com Internet Source	<1 %
36	Aminuddin Saade, Idris Idris, Diliyanti Ashari. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN USAHA PETERNAKAN BROILER DI LINGKUNGAN PEKANGLAKBU, KELURAHAN TETEBATU, KECAMATAN PALLANGGA, KABUPATEN GOWA", Jurnal Agrisistem : Seri Sosek dan Penyuluhan, 2021 Publication	<1 %
37	Dwi Agung Nugroho Arianto, Istikomah Istikomah. "Pengaruh Kontribusi Pendidikan Pelatihan dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Guru (Studi di SMP Negeri 1	<1 %

Tahunan Jepra)", Media Ekonomi dan
Manajemen, 2018

Publication

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



Bab V MARINDAH LESTARI

105611122918

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Feb-2025 04:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 2592784182

File name: BAB_V_-_2025-02-19T161510.620.docx (17.53K)

Word count: 851

Character count: 5813

Bab V MARINDAH LESTARI 105611122918

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	4%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dinastipub.org Internet Source	3%
2	ejournal.upi.edu Internet Source	2%

Exclude quotes Off
 Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Marindah Lestari. Lahir pada tanggal 25 Maret 2001 di Palu, Sulawesi Tengah. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Humaedi dan Ibu Agustin. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 104 Kalaka dari tahun 2007 hingga 2013. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 7 Sinjai Utara dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 1 Sinjai Utara dan selesai pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama masa studi, penulis aktif bergabung di Organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HUMANIERA). Penulis menjabat sebagai Departemen Pengembangan Organisasi dan Anggota dan Departemen Teknologi, Informasi dan Komunikasi Periode 2020-2021 dan Ketua Bidang periode 2021-2022. Penulis juga mengikuti program penting di kampus, yaitu Kampus Merdeka Angkatan 1 pada tahun 2021 bertempat Magang di Lembaga Administrasi Negara Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan di Kota Makassar. Dengan ketekunan, semangat tinggi, dan dukungan dari keluarga dan teman-teman, penulis telah berhasil menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) dan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Tetebatu Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa”**.